



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN,  
DAN KEMANDIRIAN FISKAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PULAU JAWA PERIODE 2006–2010)**

**SKRIPSI**

**MAOLANA AMIN ISKANDAR**

**1006813241**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI**

**SALEMBA**

**JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN,  
DAN KEMANDIRIAN FISKAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PULAU JAWA PERIODE 2006–2010)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**MAOLANA AMIN ISKANDAR**

**1006813241**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI**

**SALEMBA**

**JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Maolana Amin Iskandar

NPM : 1006813241

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Maolana Amin Iskandar

NPM : 1006813241

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi

Bahasa Indonesia : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006–2010)

Bahasa Inggris : The Effect of Capital Expenditure, Intergovernmental Transfer, and Fiscal Autonomy to Regional Economic Growth (Empirical Studies on Local Government in Java Period 2006-2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada **Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Deddi Nordiawan S.E., M.M.

Penguji : Drs. Enan Hasan Sjadili Ak., MBA.

Penguji : Ayuningtyas Hertianti S.E., M.M.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi

**Sri Nurhayati, SE, MM**

NIP.: 196003171986022001

iii

Universitas Indonesia

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya, serta sholawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Skripsi ini terselesaikan dengan perjuangan yang tidak mudah dan atas dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Kedua orang tua yang doa restu dan dukungan tulusnya senantiasa memudahkan setiap proses yang saya jalani.
- (2) Bapak Prof. Firmanzah, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
- (3) Bapak Deddi Nordiawan S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar memberikan bimbingan dan berbagi ilmu selama penyusunan skripsi ini.
- (4) Bapak Drs. Enan Hasan Sjadili Ak., MBA. Dan Ibu Ayuningtyas Hertianti S.E., M.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa berdiskusi dalam ujian lisan skripsi.
- (5) Mas, Mbak, dan semua keponakan yang selalu menjadi oase di tengah hiruk pikuk kesibukan masing-masing.
- (6) Atasan dan rekan kerja di lantai 13 Gedung Juanda II, yang berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan.
- (7) Rekan seperjuangan di Ekstensi FE UI 2010 Ani, Delfi, Imam Arifin, Heri, dan Alam terima kasih atas segala dukungan dan kesetiakawanan selama 2 tahun terakhir.
- (8) Rekan-rekan seruangan senasib sepenanggungan @EsTheaManis @wonna\_dya @dhimascp @BieYangCool.
- (9) Rekan-rekan di angkatan 76, sahabat berbagi keluh kesah dan semangat di twitter @harestya @justpanji\_ @sisimey @riri\_hesria @djubido @elfstan @massmiftah @diansyurainya @himiauralya @nugiesetyo @beta\_poonya @mas\_faham.

(10) Semua pihak yang telah membantu tetapi belum tertulis di sini, insyaAlloh akan selalu teringat dan tertulis di hati. InsyaAlloh tercatat sebagai amal baik.

Akhir kata, hanya pada Alloh segala sumber kesempurnaan dan kebaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2012

Maolana Amin Iskandar



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maolana Amin Iskandar  
NPM : 1006813241  
Program Studi : Ekstensi Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di  
Pulau Jawa Periode 2006–2010)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juli 2012

Yang Menyatakan



( Maolana Amin Iskandar )

vi

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Maolana Amin Iskandar  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006–2010)

Penelitian ini mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD meliputi belanja modal, dana perimbangan, serta kemandirian fiskal untuk dinilai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa periode 2006-2010. Penelitian ini juga menguji pengaruh *Human Development Index* (HDI), pertumbuhan jumlah penduduk, statistik politik, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Hasil pengujian menyatakan bahwa kemandirian fiskal, HDI, dan statistik politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci:  
desentralisasi fiskal, belanja modal, dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah.

## ABSTRACT

Nama : Maolana Amin Iskandar  
Program Studi : Accounting  
Judul : The Effect of Capital Expenditure, Intergovernmental Transfer, and Fiscal Autonomy towards Local Economic Growth (Empirical Studies on Regencies/Municipalities in Java for Period 2006-2010)

This study attempted to collect empirical evidence related to certain components of local budget which are capital expenditure, intergovernmental transfer, and fiscal autonomy to analyze its influence towards local economic growth of regencies/municipalities in Java for the period 2006-2010. Moreover, this study tried to evaluate the effect of Human Development Index (HDI), population growth, political statistics, and quality of local government's financial management. This study is a quantitative study using panel data. This study concluded that fiscal autonomy, HDI, and political statistics influence local economic growth. In addition, capital expenditure, intergovernmental transfer, quality of local government's financial management, and population growth do not influence local economical growth.

Key words:

Fiscal decentralization, capital expenditure, intergovernmental transfer, local own revenue, fiscal autonomy, local economic growth.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR RUMUS.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Desentralisasi Fiskal.....	9
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
2.3. Belanja Modal.....	12
2.4. Dana Perimbangan.....	14
2.4.1 Dana Alokasi Umum.....	16
2.4.2 Dana Alokasi Khusus.....	17
2.4.1 Dana Bagi Hasil.....	18
2.5. Kemandirian Fiskal.....	18
2.6. Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.6.1 Model Pertumbuhan Harrod-Domar.....	19
2.6.2 Model Pertumbuhan Rostow.....	20
2.6.3 Analisis Ekonomi Klasik.....	20
2.6.4 Analisis Ekonomi Neo Klasik.....	21

2.7. Penelitian Sebelumnya .....	23
2.7.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	23
2.7.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.7.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	25
2.7.4 Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	25
2.8. Hipotesis Penelitian .....	26
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Populasi .....	28
3.2. Pemilihan Sampel .....	28
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4. Model Penelitian dan Definisi Operasional.....	30
3.5. Operasional Variabel.....	32
3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) .....	32
3.5.2. Belanja Modal (BM) .....	33
3.5.3. Dana Perimbangan (DP) .....	33
3.5.4. Kemandirian Fiskal (KF) .....	33
3.5.5. <i>Human Development Index</i> (HDI).....	33
3.5.6. Statistik Kependudukan (POP).....	34
3.5.7. Statistik Politik (POL) .....	34
3.5.8. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (OPINI) .....	35
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
3.6.1. Statistik Deskriptif.....	35
3.6.2. Uji Asumsi Klasik .....	35
3.7. Pengolahan Data .....	36
3.8. Pendekatan Model Regresi Data Panel .....	37
3.8.1. <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) .....	37
3.8.2. <i>Fixed Effects Model</i> .....	37
3.8.3. <i>Random Effects Model</i> .....	38
3.9. Pemilihan Model .....	38
3.9.1. <i>Likelihood Ratio Test</i> ( <i>Chow Test</i> ) .....	38
3.9.2. <i>Hausman Test</i> .....	39
3.9.3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM) .....	39
3.10. Analisis Regresi .....	40
3.10.1. Uji Statistika F.....	40
3.10.2. Uji Statistika t.....	41

3.10.3. Koefisien Determinasi .....	41
3.10.4. Uji Regresi Palsu ( <i>Spurious Regression</i> ).....	41
<b>4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Statistik Deskriptif .....	42
4.2. Hasil Regresi Data Panel .....	44
4.2.1. <i>Ordinary Least Square (OLS)</i> .....	44
4.2.2. <i>Fixed Effect Model</i> .....	45
4.2.3. <i>Random Effect Model</i> .....	46
4.3. Pemilihan Model .....	47
4.3.1. <i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i> .....	47
4.3.2. <i>Hausman Test</i> .....	48
4.3.3. Uji <i>Lagrange Multiplier (LM)</i> .....	49
4.4. Analisis Hasil Regresi .....	50
4.4.1. Uji Statistika F.....	50
4.4.2. Koefisien Determinasi .....	50
4.4.3. Uji Statistika t.....	51
4.4.2. Uji Regresi Palsu ( <i>Spurious Regression</i> ).....	52
4.5. Pengujian Hipotesis.....	52
4.5.1. Hipotesis 1.....	53
4.5.2. Hipotesis 2.....	53
4.5.3. Hipotesis 3.....	54
4.5.2. Hipotesis 4.....	55
4.6. Pembahasan .....	58
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	64
5.3. Saran.....	65
5.3.1. Untuk Pemerintah.....	65
5.3.2. Untuk Peneliti lain.....	66
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010 .....	28
Tabel 3.2	Penyaringan Sampel.....	29
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	32
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif .....	42
Tabel 4.2	<i>Estimation Output</i> Hasil Regresi OLS .....	44
Tabel 4.3	<i>Estimation Output</i> Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> .....	45
Tabel 4.4	<i>Estimation Output</i> Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i> .....	46
Tabel 4.5	Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> .....	47
Tabel 4.6	Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> .....	48
Tabel 4.7	Hasil Regresi <i>fixed effect cross sectional weighth</i> .....	49
Tabel 4.8	Hasil Regresi <i>fixed effect cross sectional weighth</i> – Variabel BM.....	53
Tabel 4.9	Hasil Regresi <i>fixed effect cross sectional weighth</i> – Variabel DP.....	54
Tabel 4.10	Hasil Regresi <i>fixed effect cross sectional weighth</i> – Variabel KF.....	55
Tabel 4.11	Hasil Regresi <i>fixed effect cross sectional weighth</i> .....	56
Tabel 4.12	Ringkasan Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel PDRB .....	57

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007 - 2011 ..... 3
- Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Komposisi Belanja Daerah Tahun 2007 -2011 .. 4

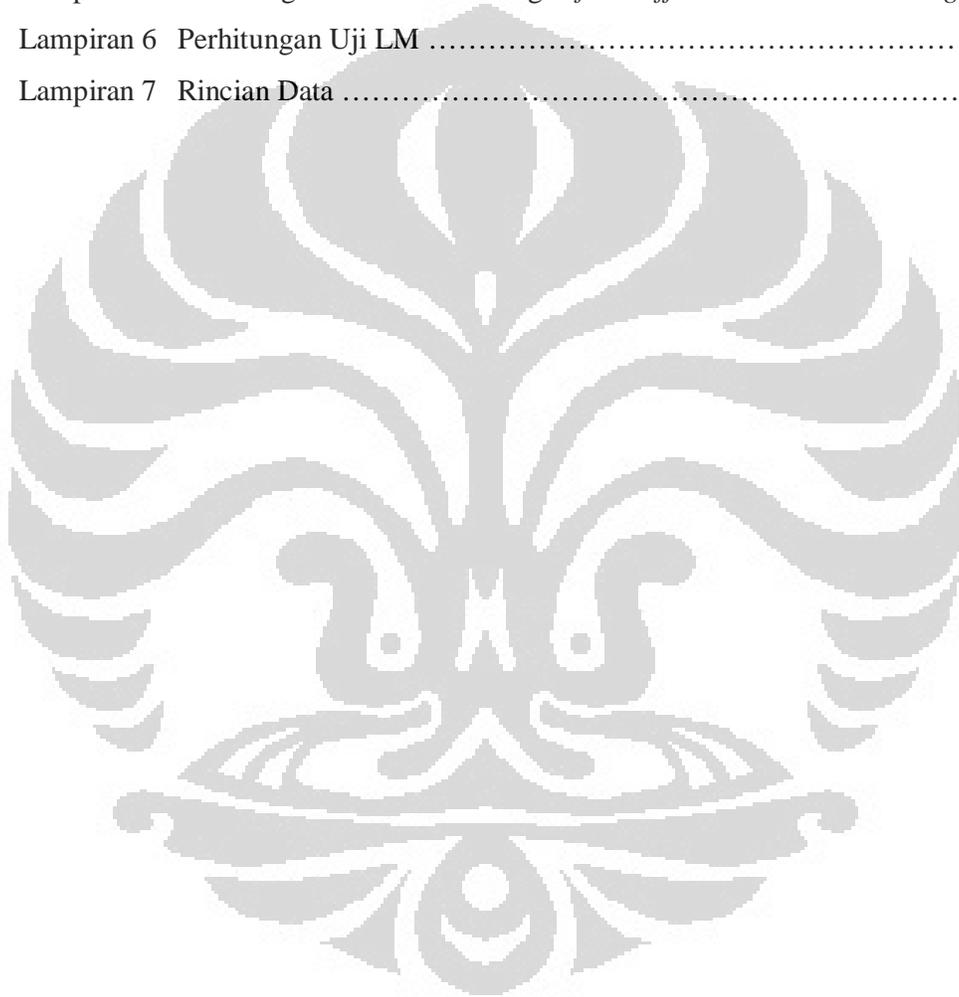


## DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	Formula DAU .....	17
Rumus 3.1	Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	32
Rumus 3.2	Variabel Belanja Modal .....	33
Rumus 3.3	Variabel Dana Perimbangan.....	33
Rumus 3.4	Variabel Kemandirian Fiskal.....	33
Rumus 3.5	Variabel HDI .....	34
Rumus 3.6	Variabel Statistik Kependudukan .....	34
Rumus 3.7	Variabel Statistik Politik .....	34
Rumus 3.8	Formula F statistik .....	38
Rumus 3.9	Formula <i>Hausman Test</i> .....	39
Rumus 3.10	Formula Uji LM .....	39
Rumus 4.1	Model Penelitian Hasil Regresi .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif .....	71
Lampiran 2 Hasil Regresi Data Panel dengan Model <i>Ordinary Least Square</i> .....	72
Lampiran 3 Hasil Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> .....	73
Lampiran 4 Hasil Regresi Data Panel dengan <i>Random Effect Model</i> .....	75
Lampiran 5 Hasil Regresi Data Panel dengan <i>fixed effect cross sectional weigth</i> ..	77
Lampiran 6 Perhitungan Uji LM .....	79
Lampiran 7 Rincian Data .....	81



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejarah kebijakan desentralisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mengatur pemerintahan daerah yang sifatnya desentralistis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri menjadi undang-undang pertama yang mengatur pelaksanaan desentralisasi keuangan di Indonesia, yaitu mengatur pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui penyerahan sumber pendapatan negara kepada daerah, pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak negara kepada daerah, dan pemberian subsidi kepada daerah. Pada masa orde baru, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian tingkatan pemerintah daerah menjadi provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus otonomi pada tingkat kabupaten/kota.

Berakhirnya masa kekuasaan orde baru serta tuntutan demokrasi dan pemberdayaan daerah, maka pada masa reformasi dikeluarkan dua undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah, yaitu UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi secara nyata di Indonesia pada Januari 2001.

Amandemen UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi salah satu poin penting dalam perjalanan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Kedua undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal diharapkan membuat pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah, serta

memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi regional. Hasil penelitian Dartanto dan Brojonegoro menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dinilai memberikan hasil positif bagi daerah yaitu kombinasi kebijakan desentralisasi fiskal (PBB, BPHTB, PPh, BHSDA, dan DAU) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari kondisi sebelum desentralisasi.

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan melalui dua instrumen utama yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*local taxing power*) dan perimbangan keuangan yang di dalam konteks APBN diberikan nomenklatur transfer ke daerah.

Dalam upaya *local taxing power*, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai langkah dalam membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Instrumen kedua adalah Transfer ke Daerah yang dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah sebagai pelaksanaan prinsip *money follow function*. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan pada pengurangan kesenjangan fiskal vertikal maupun horisontal dan peningkatan kapasitas fiskal daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dengan tetap menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal nasional.

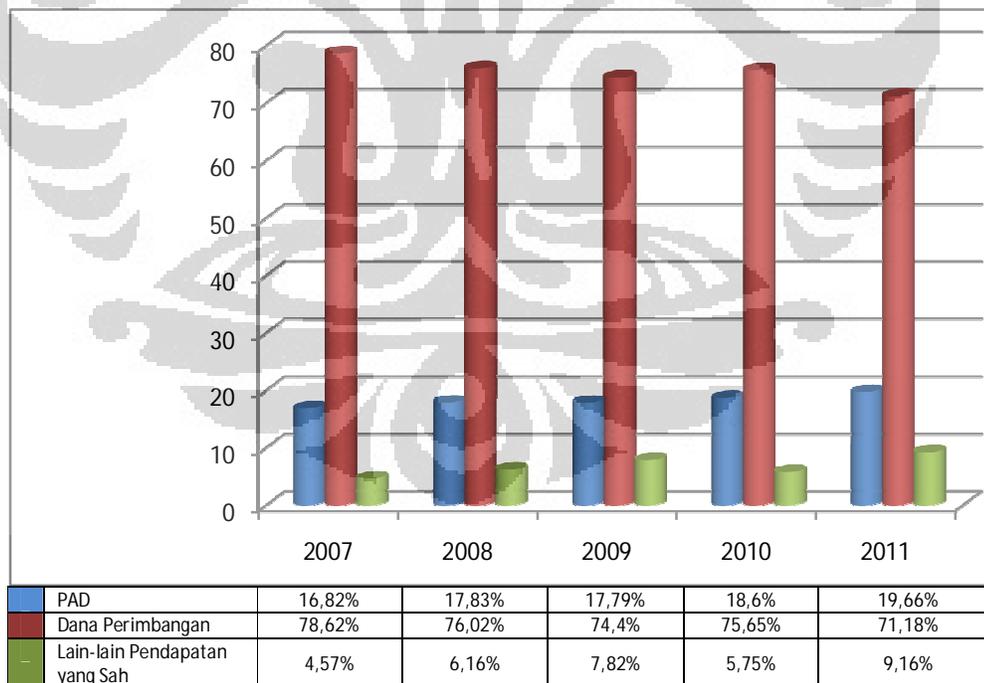
Implementasi kedua instrumen kebijakan desentralisasi fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, stabilitas keuangan, serta keberlanjutan program pembangunan daerah. Haryanto dan Astuti (2009) dalam penelitiannya terhadap propinsi-propinsi di Indonesia menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan stabilitas keuangan di daerah dan stabilitas keuangan di daerah mempengaruhi terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat maka seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia setiap tahun harus menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

diwujudkan dalam Peraturan Daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBD menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Analisis data APBD Tahun Anggaran (TA) 2007-2011 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) atas APBD dari 33 Provinsi, 491 Kabupaten/Kota bisa diperoleh beberapa gambaran atas kecenderungan komposisi pendapatan dan belanja daerah.

Diketahui bahwa secara nasional ketergantungan seluruh pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi. Hal ini terlihat pada porsi PAD walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tahun 2011 anggarannya hanya sebesar 19,66%. Sedangkan kecenderungan dana perimbangan setiap tahun mengalami penurunan hingga mencapai 71,18% pada tahun 2011.



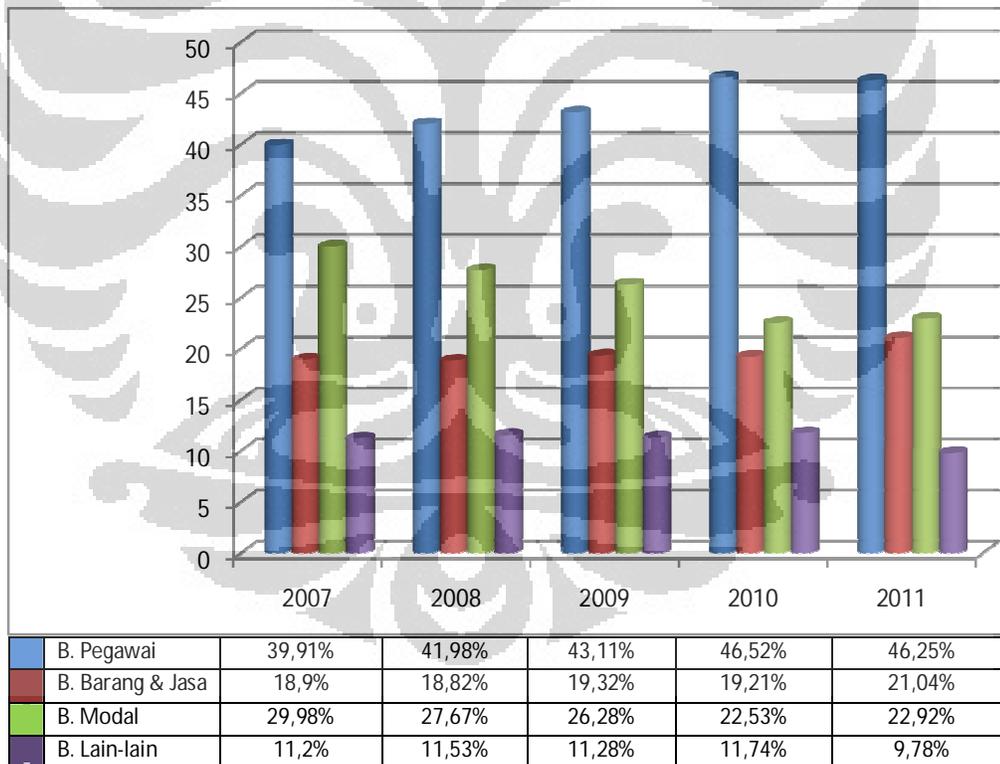
Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007 - 2011

Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2011, DJPK.

Dengan melihat besarnya porsi dana perimbangan dalam APBD, bisa dikatakan bahwa dana perimbangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Nota Keuangan APBN 2012 telah merumuskan arah kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2012 diantaranya adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Berdasarkan komposisi belanja daerah secara nasional dari tahun 2007 hingga 2011 maka dapat diketahui bahwa porsi belanja pegawai tetap dominan bila dibandingkan dengan jenis belanja yang lainnya. Besarnya belanja barang dan jasa meningkat menjadi 21,04% pada tahun 2011, sedangkan porsi belanja modal terus mengalami penurunan, yang cukup tajam terjadi pada tahun 2010 hanya sebesar 22,53%, tetapi pada tahun 2011 persinya naik menjadi 22,92%.



Gambar 1.2

Grafik Perkembangan Komposisi Belanja Daerah Tahun 2007 - 2011

Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2011, DJPK.

Secara teoritis, indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan belanja adalah pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin besar nilai belanja modal serta belanja barang dan jasa semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (DJPk, 2011).

Kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat memacu pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai program pembangunannya. Kemandirian daerah dalam membiayai program pembangunan dengan PAD bisa diukur dengan indikator kemandirian fiskal. Salah satu pendapat yang mendasari penggunaan indikator ini adalah suatu daerah bisa saja memperoleh dana perimbangan yang kecil, namun pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang cukup tinggi apabila pemerintah daerahnya mampu mendanai pengeluaran dengan PAD yang dimilikinya (Wibowo 2008).

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah (DJPk, 2011).

Pemerintah daerah dengan kewenangan fiskal yang sedemikian luas sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Penentuan besarnya anggaran belanja khususnya belanja modal dan target PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Penelitian kali ini dengan berpedoman pada literatur yang telah ada akan mencoba untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan kemandirian fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk kabupaten/kota di pulau Jawa. Dengan berpedoman pada penelitian Akai dan Sakata (2002) dan Wibowo (2008), penulis mencoba untuk melakukan penelitian sejenis dengan objek penelitian yang berbeda dan modifikasi pada variabel independen.

Penelitian ini akan menggunakan objek penelitian pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa periode 2006-2010 dengan pertimbangan pemerintah kabupaten/kota merupakan unit pemerintahan yang dapat mengaplikasikan kebijakan anggaran untuk kepentingan rakyat di wilayahnya secara langsung. Pemilihan periode 2006-2010 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini dan bermanfaat bagi para pembaca. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008) menggunakan sampel seluruh propinsi di Indonesia pada periode 1999-2004, sedangkan Akai dan Sakata (2002) meneliti 50 negara bagian di Amerika Serikat periode 1992-1996.

Beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang penulis dalam menyusun skripsi ini antara lain:

1. Kecenderungan penurunan porsi belanja modal pemerintah daerah serta masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat;
2. Penelitian mengenai pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini mengangkat judul **"Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006–2010)"**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah?
3. Apakah kemandirian fiskal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah?
4. Apakah belanja modal, dana perimbangan, dan kemandirian fiskal secara bersama-sama berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah membuktikan secara empiris hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Untuk membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Untuk membuktikan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan terkait belanja modal, dana perimbangan, dan penggalian potensi PAD; dan
3. Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada sampel Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa mulai tahun 2006 s.d. 2010. Pemilihan sampel

untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa karena secara total nilai APBD yang ada di pulau Jawa merupakan yang terbesar dibandingkan dengan nilai total APBD dari Pemerintah Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa. Periode dipilih tahun 2006 s.d. 2010 dengan alasan data realisasi APBD yang terbaru adalah tahun 2010 sehingga diharapkan hasil penelitian ini relevan dan benar-benar mencerminkan kondisi saat ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi para pembaca mengenai penelitian ini, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami isi tulisan ini. Sistematika penulisan juga menunjukkan urutan-urutan yang berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Pada bab 1 akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan penelitian yang menjelaskan alasan penulis mengambil tema desentralisasi fiskal khususnya terkait belanja modal, dana perimbangan, dan kemandirian fiskal. Bab ini juga menjelaskan hal lain yaitu perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian yang menggambarkan informasi mengenai pokok-pokok yang ditulis dalam skripsi ini.

Bab 2 berisi penjelasan mengenai teori-teori yang berhubungan seperti teori tentang desentralisasi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja modal, dana perimbangan, kemandirian fiskal, dan pertumbuhan ekonomi, penelitian sebelumnya tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, serta diakhiri dengan hipotesis penelitian.

Bab 3 menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan yaitu desain dan model penelitian, sumber data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

Bab 4 berisi analisis dan pembahasan tentang permasalahan yang diteliti termasuk penjabaran hasil pengujian statistik yang telah dilakukan.

Bab 5 merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai topik penulisan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Desentralisasi Fiskal

Oates (1972) dalam Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan pengertian desentralisasi fiskal sebagai “*derajat kebebasan dalam dalam membuat keputusan mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan*”.

*Prud’homme* (1990) dalam Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan konsep desentralisasi fiskal secara sederhana meliputi tiga kriteria yaitu:

1. *Share* pajak daerah terhadap pajak pusat;
2. *Share* pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat;
3. *Share* besarnya subsidi pemerintah pusat terhadap total sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sidik (2002) menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi, terutama menyangkut aspek politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum desentralisasi menurut studi Bank Dunia yang dilakukan oleh Rondinelli (1981, 1989) sebagaimana dikutip oleh Dilinger (1994) pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. Desentralisasi Politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik. Desentralisasi politik umumnya berkaitan dengan sifat pluralistik di bidang politik untuk proses ke arah lebih demokratis dengan memberikan kewenangan pada lembaga perwakilan rakyat untuk lebih berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.
2. Desentralisasi Administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan

kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu Dekonsentrasi (*deconcentration*), Devolusi (*devolution*), dan Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*).

3. Desentralisasi Fiskal (*fiscal decentralization*), merupakan komponen utama dari desentralisasi. Desentralisasi fiskal mencakup:
  - a. *Self financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.
  - b. *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja;
  - c. Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak daerah terutama pajak properti (PBB), pajak penjualan (PPn), pajak penghasilan perseorangan (PPh Orang Pribadi) atau berbagai jenis retribusi daerah;
  - d. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari sumbangan umum (DAU), sumbangan khusus (DAK), sumbangan darurat (Dana Darurat), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
  - e. Kebebasan daerah melakukan pinjaman.
4. Desentralisasi Ekonomi (*economic or market decentralization*), merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam disain desentralisasi secara komprehensif dipandang dari perspektif pemerintah yaitu kebijakan tentang desentralisasi ekonomi dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi yang menitikberatkan pada upaya efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, terutama melalui kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah-untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik- sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003).

Sidik (2002) menjelaskan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah;
2. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional;
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah;
4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah;
5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Mardiasmo (2002) mengatakan tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Prawirosetoto (2004) dalam Halim (2007) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Inti dari pelaksanaan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia. Desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam rangka keseimbangan fiskal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Freeman dan Shoulders (2003) mendefinisikan anggaran sebagai proses alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, dan anggaran merupakan rencana kerja dalam satuan mata uang untuk suatu periode tertentu.

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik (Darwanto dan Kartikasari, 2007).

Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

APBD yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
2. Belanja daerah yang dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja;
3. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## 2.3 Belanja Modal

Ross et al (2008) dalam Sianipar (2009) mendefinisikan pengeluaran modal atau *Capital Expenditure* sebagai arus kas keluar yang digunakan untuk memperoleh aktiva baru atau merekondisi aktiva yang sudah ada sehingga akan dapat menambah umur ekonomis aktiva bersangkutan.

*Capital Expenditure* digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan.

Marino (1986) menjelaskan bahwa pembelian aset harus memenuhi dua kriteria untuk dapat dianggap sebagai *capital expenditure*, yaitu:

1. mempunyai nilai yang signifikan;
2. memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam waktu tertentu.

Definisi di atas tidak terbatas kepada aset tetap (tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan). Berdasarkan tujuannya, *capital expenditures* dibagi dalam lima kategori, yaitu:

- a) *Fixed assets*;
- b) *Acquisitions*;
- c) *Capital leases*;
- d) *Research and development*;
- e) *New product lines*;

PP Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas mengklasifikasikan belanja modal dalam enam kelompok yaitu:

1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja gedung dan bangunan;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya;
6. Belanja aset lainnya.

Pengertian belanja modal menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya (Nordiawan dan Hertianti, 2006).

## 2.4 Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menjelaskan pengertian Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal nasional (Sutandi dalam Halim, 2001).

Ma (1997) dalam Halim (2001) menjelaskan tiga alasan untuk melakukan transfer antar pemerintah dilihat dari sudut pandang ekonomi yaitu:

1. Terdapat ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalances*) yang terjadi karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai pengeluarannya;
2. Adanya ketidakseimbangan fiskal horisontal (*horizontal fiscal imbalances*) yaitu perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah;
3. Adanya efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*) yaitu eksternalitas ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait kebijakan anggaran transfer ke daerah pada tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2012 yang diarahkan untuk:

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*);
2. menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro;
5. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
6. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
7. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; serta
8. meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik.

Saragih (2003) menjelaskan bahwa kebijakan dana perimbangan merupakan konsekuensi dari strategi desentralisasi fiskal. Namun, dalam proses implementasi desentralisasi fiskal, dapat timbul “konflik” antara pusat dan daerah, terutama bila dilihat dalam konteks pembagian keuangan yang adil. Dalam menyikapi hal ini, pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah (*inter-governmental transfer system*) dalam UU Otonomi Daerah melalui tiga pendekatan yang umum dilakukan oleh banyak negara, yakni:

1. Pendekatan berdasarkan persentase (*by percentage*)

Pendekatan dalam sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan persentase merupakan strategi yang paling baik untuk

menciptakan keadilan bagi semua daerah. Artinya, daerah yang potensial dari sudut ekonomi dan sumber daya alam, maka daerah tersebut mendapatkan bagian pendapatan yang relatif lebih besar dibandingkan daerah yang perkembangan perekonomiannya dan potensi sumber daya alamnya relatif sedikit.

2. Pendekatan berdasarkan formula (*by formula*)

Pendekatan berdasarkan formula bertujuan untuk mendekati pembagian yang relatif adil dan objektif sesuai dengan kondisi terakhir daerah.

3. Pendekatan berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus atau insidental (*by ad-hoc or specific need*)

Pendekatan berdasarkan kebutuhan insidental adalah untuk membantu daerah-daerah khusus yang membutuhkan tambahan dana untuk menanggulangi suatu pengeluaran daerah yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu, misalnya bencana alam dan lain-lain.

Dalam struktur APBD, dana perimbangan termasuk dalam kelompok pendapatan daerah, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

#### 2.4.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah (*equalization grant*) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, atau bisa disebut DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya (*horizontal imbalance*). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yang berarti pemerintah daerah leluasa menggunakannya karena tidak terikat dalam kriteria tertentu.

Formulasi DAU bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Daerah yang lebih mampu akan mendapatkan DAU yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan DAU sama sekali. UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan formula yang digunakan dalam perhitungan DAU

adalah alokasi dasar dan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)} \quad (2.1)$$

Keterangan:

AD = Gaji PNS di Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan secara rinci mengenai formula DAU. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal diukur menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan PAD dan Dana Bagi Hasil.

Dartanto dan Brodjonegoro menjelaskan formula pembagian DAU menggunakan dua kriteria yaitu kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah (*fiscal need*). Kemampuan fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), potensi industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), potensi sumber daya alam (diukur dengan PDRB sektor primer), dan potensi sumber daya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Kebutuhan fiskal dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain jumlah penduduk, total area, kondisi geografis (indeks konstruksi), dan jumlah penduduk miskin (menggunakan konsep kemiskinan dengan ukuran *poverty line*).

#### 2.4.2 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

PP Nomor 55 tahun 2005 menjelaskan bahwa daerah yang akan menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS Daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan

otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis disusun oleh menteri teknis terkait dalam bentuk indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Dalam hal kegiatan yang didanai dengan DAK adalah kegiatan yang bersifat kegiatan fisik, maka daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang diterima.

### **2.4.3 Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan PP Nomor 55/2005, dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

## **2.5 Kemandirian Fiskal**

Arai dan Sakata (2002) memperkenalkan indikator kemandirian fiskal dengan nama *autonomy indicator*. Indikator ini mengukur otonomi (tingkat kemandirian fiskal) dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, jika persentase pendapatan atau belanja pemerintah daerah adalah kecil dibandingkan dengan total pendapatan atau belanja negara, maka tingkat kemandirian daerah tersebut dinilai tinggi jika semua kebutuhan fiskal dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri, dalam hal pemerintah tersebut menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal (Akai dan Sakata 2002).

Wibowo (2008) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal dapat diukur dengan indikator otonomi yang terdiri atas berbagai ukuran kemandirian fiskal. Salah satu argumen yang mendasari penggunaan indikator ini adalah suatu daerah dapat memperoleh dana perimbangan yang kecil dari pemerintah pusat, namun pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang cukup tinggi apabila

pemerintah daerah mampu mendanai pengeluaran dengan PAD yang dimilikinya. *Proxy level* kemandirian fiskal dapat dijelaskan dengan rasio antara lain:

1. Rasio total PAD seluruh kabupaten/kota di suatu propinsi terhadap total pendapatan, baik yang memperhitungkan DAU dan DAK;
2. Rasio total PAD seluruh kabupaten/kota di suatu propinsi terhadap total pendapatan, tanpa memperhitungkan DAU dan DAK;
3. rasio PAD terhadap total pengeluaran;
4. rasio PAD terhadap dana perimbangan.

Rasio PAD terhadap total pengeluaran menyajikan tingkat independensi suatu daerah dalam membiayai pengeluaran APBD. Semakin besar rasio PAD terhadap total pengeluaran semakin besar pula tingkat otonomi di daerah tersebut. Semakin besar PAD yang diterima pemerintah daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat seyogianya kian mengecil sehingga derajat desentralisasi fiskal semakin baik (Wibowo, 2008).

DJPK dalam Deskripsi dan Analisis APBD 2011 (2011) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal dapat diketahui melalui rasio kemandirian daerah yang dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer.

## **2.6 Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.6.1 Model Pertumbuhan Harrod-Domar**

Harrod dan Domar mencetuskan konsep pertumbuhan berimbang (atau eksponensial) yang mencakup penjelasan tentang tingkat pertumbuhan alamiah jangka panjang.

Analisis Harrod-Domar menjelaskan peranan akumulasi modal dalam proses pertumbuhan (perkembangan) ekonomi yang terus menerus, yaitu di satu pihak investasi menghasilkan pendapatan dan di lain pihak investasi akan menambah kapasitas produksi perekonomian (Adisasmita 2008).

Model pertumbuhan Harrod-Domar menjelaskan bahwa pertambahan pendapatan nasional dihubungkan dengan pembentukan modal, hasrat marginal

untuk menabung (*marginal propensity to save*), dan *incremental capital-output ratio* (ICOR) ke dalam suatu kesatuan hubungan ekonomi. Tingkat pembangunan ekonomi (*rate of development*) ditentukan oleh hubungan antara pembentukan modal (*capital formation*), laju pertumbuhan penduduk (*rate of population growth*), dan rasio modal-output (COR) (Adisasmita 2008).

Model pertumbuhan Harrod-Domar dapat dipakai untuk menganalisis pertumbuhan wilayah dengan memperhitungkan perpindahan modal dan tenaga kerja antar wilayah. Pertumbuhan yang mantap (*steady growth*) harus memenuhi syarat-syarat keseimbangan, yaitu adanya kesamaan antara tingkat pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan modal, dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja (Adisasmita 2008).

### **2.6.2 Model Pertumbuhan Rostow**

W.W. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Masyarakat tradisional (*the traditional society*);
2. Prasyarat untuk lepas landas (*the precondition for take off*);
3. Lepas landas (*the take off*);
4. Gerakan ke arah kedewasaan (*the drive to maturity*);
5. Massa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*).

Analisis Rostow berdasarkan pada analisis ekonomi dan analisis non-ekonomi yang menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi (Adisasmita 2008). Unsur-unsur pertumbuhan ekonomi di suatu negara terdiri atas:

1. Sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, penduduk, disiplin, motivasi, dan lainnya);
2. Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, iklim, dan lainnya);
3. Pembentukan modal (mesin-mesin, pabrik, jalan raya, dan lainnya);
4. Tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan, dan lainnya).

### **2.6.3 Analisis Ekonomi Klasik**

Pemikiran dari analisis ekonomi klasik yang diwakili oleh Adam Smith sebagaimana disebutkan dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the Nature and*

*Causes of the Wealth of Nation* (1776) menjelaskan pentingnya peranan pembagian kerja (*division of labour*) dalam proses kemajuan ekonomi. Pembagian kerja yang baik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi melalui beberapa cara yaitu:

1. Peningkatan tingkat kemahiran tenaga kerja;
2. Penghematan waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang (*output*);
3. Penemuan mesin-mesin (alat) yang lebih canggih.

Dalam menganalisis proses perkembangan ekonomi, Adam Smith menyebutkan adanya pengaruh penghematan atau kehematan eksternal (*external economies*) yaitu penghematan yang disebabkan karena faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. Contoh penghematan eksternal adalah perluasan produksi dari perusahaan lain yang berhasil memproduksi *output* dengan biaya per unit yang lebih rendah, di mana produk dari perusahaan tersebut digunakan sebagai bahan baku di perusahaan lain. Penurunan biaya produksi bahan baku dari perusahaan lain tersebut merupakan penghematan eksternal karena diakibatkan oleh faktor di luar perusahaan yang bersangkutan (Adisasmita 2008).

Analisis ekonomi klasik menjelaskan ciri fundamental dari perkembangan ekonomi adalah pembentukan modal. Para penulis klasik berpendapat bahwa keadaan teknologi dan sumberdaya alam tetap konstan dan perubahan penduduk tergantung pada tingkat pendapatan per kapita. Dengan demikian mereka mampu menganalisis mekanisme akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk, di samping itu mampu merumuskan prinsip-prinsip mengenai gerak-gerik tingkat perkembangan dalam jangka panjang (Adisasmita 2008).

#### **2.6.4 Analisis Ekonomi Neo-Klasik**

Ahli ekonomi neo klasik mengelaborasi teori pembagian pendapatan, teori nilai, atau teori keseimbangan umum dengan fokus pembahasan lebih diarahkan pada hubungan antara berbagai bagian dari suatu perekonomian dalam jangka pendek.

Ahli-ahli neo klasik beranggapan adanya kemungkinan bagi modal untuk menggantikan tenaga kerja, artinya suatu perekonomian dapat melakukan akumulasi modal tanpa harus memperbesar jumlah tenaga kerja. Selain itu, kemajuan teknologi dianggap sebagai suatu faktor yang mendorong pertambahan

**Universitas Indonesia**

pendapatan nasional. Kemajuan teknologi dalam hal perbaikan metode produksi akan mengakibatkan penurunan tingkat biaya sehingga dapat mendorong produsen untuk memperbesar kapasitas produksinya (Adisasmita 2008).

Konsep pembangunan menurut neo klasik didasarkan pada tiga gagasan yang saling berhubungan dalam pemikiran ekonomi yaitu:

1. Pembangunan dianggap sebagai suatu proses yang berangsur-angsur (*gradual*) dan terus-menerus (*continuous*);
2. Proses pembangunan bersifat selaras (*harmonious*) dan kumulatif;
3. Pandangan yang optimistik terhadap kemungkinan-kemungkinan kemajuan teknologi yang terus-menerus.

Perekonomian dianggap sebagai suatu organisme sehingga kemajuan atau pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan organik (*organic growth*). Kemajuan teknologi berasal dari kemajuan dan persebaran pengetahuan yang terjadi secara berangsur-angsur. Penemuan teknologi baru akan menjadi salah satu mata rantai dalam rangkaian penemuan yang lain dan proses penerapan teknologi baru tersebut ke dalam arus ekonomi pada umumnya dianggap relatif lunak (*smooth*) dan secara terus-menerus (Adisasmita 2008).

Pembangunan yang dianggap bersifat selaras dan saling memperkuat (*harmonious and reinforcing*) akan menguntungkan semua golongan pendapatan. Pemikiran neo klasik yang tentang proses pertumbuhan yang selaras dan kumulatif dapat dikaitkan dengan konsep *external economies* yang dikenalkan oleh Marshall. Konsep yang dikenalkan oleh Marshall ini membedakan antara penghematan internal (*internal economies*) dan penghematan eksternal (*external economies*). Penghematan internal adalah keuntungan yang timbul karena diintroduksikannya mesin-mesin yang lebih canggih, bertambah baiknya organisasi pemasaran dan penelitian, bertambah luasnya spesialisasi tenaga kerja dan manajemen, dengan demikian memungkinkan bertambahnya skala produksi pada suatu perusahaan. Penghematan eksternal terjadi karena perkembangan dari cabang-cabang industri yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membantu, atau dikenal dengan konsep saling ketergantungan (interdependensi) dan saling melengkapi (komplementaritas) antara berbagai sektor dalam perekonomian (Adisasmita 2008).

Pandangan ahli ekonomi neo klasik yang optimistik didasarkan pada kepercayaan yang lebih besar terhadap kemampuan manusia untuk mengatasi kendala dan keterbatasan yang timbul dalam perkembangan pembangunan, dan ternyata kemajuan teknologi dan kualitas tenaga kerja cenderung bertambah baik. Peranan sumberdaya manusia memperlihatkan kecenderungan makin bertambah dalam mengatasi kendala dan keterbatasan yang dihadapi (Adisasmita 2008).

## **2.7 Penelitian Sebelumnya**

Literatur ekonomi dan keuangan publik telah banyak membahas pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi kebijakan pendapatan maupun belanja pemerintah. Penelitian empiris mengenai hubungan antara kebijakan desentralisasi fiskal, belanja modal, dana perimbangan, kemandirian fiskal, dan pertumbuhan ekonomi terus berkembang dengan unit penelitian berupa negara, negara bagian, provinsi, dan kabupaten/kota.

### **2.7.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dinilai memberikan hasil yang positif bagi daerah sebagaimana hasil penelitian Dartanto dan Brojonegoro yang menyebutkan bahwa kombinasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia (PBB BPHTB, PPh, BHSDA, dan DAU) mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0.411% dari kondisi sebelum desentralisasi. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan pendapatan per kapita, realisasi PBB, realisasi BPHTB, realisasi PPh, realisasi BHSDA, dan realisasi DAU.

Studi yang dilakukan oleh Haryanto dan Astuti (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan stabilitas keuangan di daerah dan stabilitas keuangan di daerah mempengaruhi terciptanya pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keuangan direpresentasikan dengan proksi berupa perubahan inflasi, sedangkan desentralisasi fiskal diwujudkan dalam proksi rasio DAU terhadap total penerimaan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulrich Thiessen terhadap kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan pada negara-negara OECD (*Organization*

*for Economic Cooperation and Development*) menunjukkan keuntungan dan pengaruh yang terbatas dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa pertumbuhan PDB per kapita dan variabel independen berupa bagian belanja daerah dibandingkan belanja pemerintah pusat, bagian penerimaan pajak daerah dibandingkan total penerimaan pajak pusat, serta bagian PAD dibandingkan total penerimaan daerah.

### **2.7.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Hamzah (2006) menunjukkan hasil bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan pada 26 provinsi di Indonesia periode 1992-2002. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase PDRB dibandingkan jumlah penduduk, rasio belanja pemda dibandingkan belanja pemerintah pusat, dan rasio total pendapatan daerah dikurangi dana transfer dibandingkan total belanja pemda.

Hasil penelitian Anasmen (2009) terhadap kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan PDRB riil pada kabupaten/kota, sedangkan variabel independen berupa belanja modal pemerintah riil pada kabupaten/kota dan investasi swasta riil pada kabupaten/kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Landau (1985) pada 16 negara berkembang periode 1952-1976 menunjukkan bahwa belanja konsumsi dan belanja investasi pemerintah menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi transfer menunjukkan hubungan yang positif. Pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam pertumbuhan PDB per kapita. Variabel independen direpresentasikan dalam rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional, rasio belanja konsumsi pemerintah terhadap pendapatan nasional, serta rasio transfer terhadap belanja pemerintah.

### **2.7.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Penelitian yang dilakukan oleh Pusporini (2006) menunjukkan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel dalam penelitian ini direpresentasikan dalam proksi berupa pertumbuhan PDRB kabupaten/kota dan pertumbuhan dana perimbangan.

Hasil penelitian Indarto (2011) menyatakan bahwa belanja pemerintah pusat yang direalisasikan di daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh belanja transfer ke daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil bahwa pada provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki pengaruh positif, sedangkan provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi rendah berpengaruh negatif. Proksi atas variabel penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB harga konstan tahun 2000, bagian belanja pemerintah pusat terhadap PDRB, dan bagian belanja transfer ke daerah terhadap PDRB.

### **2.7.4 Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil penelitian Akai dan Sakata (2002) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada 50 negara bagian di Amerika Serikat. *Revenue*, *Production*, dan *Production-Revenue Indicator* menunjukkan hasil regresi positif dan berpengaruh signifikan. *Autonomy Indicator* menunjukkan hasil regresi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Proksi atas variabel pertumbuhan ekonomi adalah rata-rata pertumbuhan PDB per kapita periode 1992-1996. Variabel *autonomy indicator* direpresentasikan dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah.

Studi yang dilakukan oleh Wibowo (2008) terhadap 29 propinsi periode 1999-2004 menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitian terkait kemandirian fiskal berupa *autonomy indicator* menyatakan bahwa perlu adanya analisis yang lebih cermat untuk mengamati hubungan antara otonomi fiskal dengan performa pembangunan daerah. Hal ini karena riset memperlihatkan bahwa sebelum tahun 2001, hubungan antara kedua variabel tersebut adalah negatif. Variabel performa pembangunan daerah direpresentasikan dengan proksi pertumbuhan ekonomi daerah per kapita, sedangkan variabel *autonomy indicator* direpresentasikan dalam proksi berupa rasio PAD terhadap total belanja daerah.

**Universitas Indonesia**

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Bila dicermati komposisi belanja daerah secara nasional dari tahun 2007 hingga 2010 maka dapat diketahui bahwa porsi belanja modal terus mengalami penurunan, dari 29,98% menjadi hanya sebesar 22,5% pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 porsinya menjadi 22,92%.

Model pertumbuhan ekonomi menurut Rostow menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, pabrik, jalan raya, dan sarana infrastruktur lainnya.

Penelitian Gunalp dan Gur (2002) terhadap 34 negara berkembang menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah yang ditunjukkan dengan total belanja pemerintah berpengaruh positif dan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali periode 2001-2004 menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PAD.

Berdasarkan data, teori, dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang pertama untuk penelitian ini adalah:

### **H1: Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

Sutandi (2007) dalam Halim (2007) menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis distribusi pendapatan yang merata dan optimalisasi belanja pemerintah daerah. Kebijakan fiskal yang kondusif berupa desain alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah.

Diketahui bahwa ketergantungan seluruh pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi. Hal ini terlihat dari porsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah yang masih tinggi, yaitu rata-rata masih di atas 70% dari total pendapatan daerah jika dilihat dari kecenderungan data mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2011.

Hasil penelitian Indarto (2011) yaitu belanja pemerintah pusat yang direalisasikan di daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh belanja transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi

dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki pengaruh positif, sedangkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi rendah mempunyai nilai negatif.

Atas dasar kondisi yang telah disebutkan di atas dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah:

**H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

Hasil penelitian Akai dan Sakata (2002) pada 50 negara bagian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa *autonomy indicator* menunjukkan hasil regresi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008) menyatakan bahwa kemandirian fiskal dengan proksi rasio PAD terhadap total belanja daerah secara statistik kurang signifikan dalam menjelaskan perbedaan performa ekonomi antar propinsi dengan koefisien regresi negative.

Berdasarkan hasil penelitan tersebut, maka hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah:

**H3: Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

Berdasarkan ketiga hipotesis sebelumnya, maka penulis bermaksud mengkombinasikan ketiga variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan pengujian regresi secara bersama-sama dengan menambahkan beberapa variabel kontrol yang telah dijelaskan di bab ini. Sehingga, hipotesis keempat untuk penelitian ini adalah:

**H4: Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal secara bersama-sama berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah**

## BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota di pulau Jawa. Data yang digunakan adalah selama lima tahun, mulai tahun 2006 sampai dengan 2010. Periode tersebut diambil agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa periode 2006-2010 diketahui total populasi data awal adalah sebanyak 554 data, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Populasi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa  
Periode 2006-2010

No	Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota
1	2006	109
2	2007	110
3	2008	111
4	2009	112
5	2010	112
<b>Total</b>		<b>554</b>

Sumber: Permendagri Nomor 66 Tahun 2011.

Data populasi tersebut akan mengalami penyaringan berkaitan dengan kelengkapan data realisasi APBD, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Human Development Index*, statistik kependudukan, statistik politik, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### 3.2 Pemilihan Sampel

Penelitian dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, kecuali Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta karena unit pemerintahan setingkat kabupaten/kota di DKI Jakarta tidak bersifat otonom. Penelitian ini menggunakan data panel, sehingga masing-masing data akan dianggap satu data terpisah untuk setiap tahunnya.

Data Pemerintah Kabupaten/Kota yang didapatkan oleh penulis menunjukkan jumlah kabupaten/kota per tahun 2010 adalah sebanyak 112 kabupaten/kota. Rincian data Pemerintah Kabupaten/Kota periode 2006 sampai dengan 2010 adalah 554 data kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Penyaringan atas populasi akan dilakukan berdasarkan kelengkapan data realisasi APBD, data PDRB, *Human Development Index*, statistik kependudukan, statistik politik, dan data opini BPK atas LKPD.

Berdasarkan data realisasi APBD yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diketahui terdapat ketidaklengkapan data realisasi APBD atas 28 data dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2010, sehingga data tersebut tidak akan dimasukkan dalam sampel penelitian.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2006-2010 diketahui terdapat ketidaklengkapan data PDRB sebanyak 2 data dan 1 data statistik kependudukan.

Data statistik politik yang dikumpulkan oleh penulis dari beberapa sumber seperti BPS, KPU, dan situs DPRD atau Pemerintah Kabupaten/Kota diperoleh hasil ketidaklengkapan data sebanyak 158 data.

Dalam pengujian analisis regresi data panel pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah *balanced panel*. Menurut Suliyanto (2011) yang disebut panel data seimbang atau *balanced panel* adalah data panel dimana setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Untuk memperoleh *balanced panel* maka ada 90 data yang harus dihilangkan.

Berdasarkan hal tersebut maka data yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 275 data yang merupakan rincian dari 55 kabupaten/kota pada periode 2006-2010. Secara ringkas, proses penyaringan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penyaringan Sampel

No	Deskripsi	Jumlah
1	Data kabupaten/kota di Indonesia selama 5 tahun	554
2	Data realisasi APBD tidak lengkap	<u>28</u>
		526
3	Data PDRB tidak lengkap	<u>2</u>
		524

No	Deskripsi	Jumlah
4	Data statistik kependudukan tidak lengkap	<u>1</u>
		523
5	Data statistik politik tidak lengkap	<u>158</u>
		365
6	Seleksi <i>balanced panel</i>	<u>90</u>
	Sampel akhir	275

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota periode 2006 sampai dengan 2010 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran tersebut akan merinci data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Belanja Modal dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Data Kemandirian Fiskal diperoleh dengan menghitung rasio realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi total belanja daerah.

Data lain yang akan dianalisis adalah data PDRB, statistik kependudukan, dan *Human Development Index* (HDI) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data terkait opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Data yang akan dianalisis merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber untuk selanjutnya didokumentasikan dan dianalisis oleh penulis.

### 3.4 Model Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sekaran (2003) menyatakan bahwa secara umum pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk melakukan generalisasi dengan melakukan pengujian statistik dan harus steril dari pengaruh subjektif peneliti.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi, yaitu metode yang berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel dependen, pada satu atau lebih variabel lain, variabel

**Universitas Indonesia**

independen atau *explanatory variables*, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (*mean*) atau rata-rata (populasi) variabel dependen, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) berupa variabel independen (Gujarati, 1978).

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut.

Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada akan digunakan model regresi data panel. Data panel adalah data gabungan antara data *cross section* dan data *time series*.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yaitu Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kemandirian Fiskal yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan PDRB sebagai variabel dependen.

Model regresi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1\text{BM} + \beta_2\text{DP} + \beta_3\text{KF} + \beta_4\text{LnHDI} + \beta_5\text{POP} + \beta_6\text{POL} + \beta_7\text{OPINI} + \varepsilon$$

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dengan proksi pertumbuhan PDRB. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (BM) dengan proksi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, Dana Perimbangan (DP) dengan proksi rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, dan Kemandirian Fiskal (KF) dengan proksi rasio PAD terhadap total belanja.

Dalam model penelitian ini penulis menambahkan variabel kontrol *Human Development Index* (HDI) dengan proksi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota yang dirilis oleh BPS untuk kemudian ditransformasikan menjadi nilai log natural HDI (LnHDI). Variabel kontrol berikutnya adalah statistik kependudukan (POP) dengan proksi persentase pertambahan jumlah penduduk.

Dalam penelitian ini penulis menambahkan dua variabel kontrol lain yaitu statistik politik daerah (POL) dengan proksi rasio jumlah anggota DPRD dengan

tingkat pendidikan minimal setingkat Sarjana dan variabel kualitas pengelolaan keuangan daerah (OPINI) dengan proksi opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara ringkas definisi operasional atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Notasi	Arti	Definisi Variabel (bentuk)
1	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000
2	BM	Belanja Modal	Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah
3	DP	Dana Perimbangan	Rasio Realisasi Dana perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah
4	KF	Kemandirian Fiskal	Rasio Realisasi PAD terhadap total Belanja Daerah
5	HDI	<i>Human Development Index</i>	Nilai HDI kabupaten/kota
6	POP	Statistik Kependudukan	Persentase pertambahan jumlah penduduk
7	POL	Statistik Politik	Rasio jumlah anggota DPRD dengan tingkat pendidikan minimal setingkat Sarjana
8	OPINI	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterangan:

- a. Variabel Dependen : PDRB;
- b. Variabel Independen : BM, DP, KF;
- c. Variabel Kontrol : HDI, POP, POL, OPINI.

### 3.5 Operasional Variabel

#### 3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi daerah direpresentasikan dengan proksi berupa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

$$PDRB = \frac{PDRB(t) - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\% \quad (3.1)$$

Penelitian yang dilakukan oleh Anasmen (2009) dan Indarto (2011) menggunakan proksi berupa pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000

sebagai variabel dependen untuk merepresentasikan pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3.5.2 Belanja Modal (BM)

Belanja modal dalam penelitian ini direpresentasikan dengan rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah.

$$BM = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \quad (3.2)$$

### 3.5.3 Dana Perimbangan (DP)

Dana Perimbangan direpresentasikan dengan rasio realisasi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah.

$$DP = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \quad (3.3)$$

### 3.5.4 Kemandirian Fiskal (KF)

Kemandirian Fiskal direpresentasikan dengan rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total realisasi belanja daerah.

$$KF = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \quad (3.4)$$

Proksi ini digunakan oleh Wibowo (2008) dalam penelitiannya tentang desentralisasi fiskal dengan menyebutnya sebagai *autonomy (independence) indicator*.

### 3.5.5 Human Development Index (HDI)

*Human Development Index (HDI)* merepresentasikan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nilai HDI merupakan hasil perhitungan dari kombinasi atas beberapa unsur, yaitu

1. angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan;
2. angka melek huruf, rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan

3. kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

$$\text{HDI} = \frac{\text{Indeks Harapan Hidup} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Pendapatan}}{3} \quad (3.5)$$

Dalam penelitian ini, variabel HDI akan ditransformasikan menjadi Log Natural HDI (LnHDI) berdasarkan dua pertimbangan yaitu satuan variabel HDI (indeks) yang berbeda dengan variabel lain (%) dan tingginya nilai HDI dibandingkan nilai variabel lain.

### 3.5.6 Statistik Kependudukan (POP)

Statistik Kependudukan direpresentasikan dalam proksi berupa Persentase pertambahan jumlah penduduk.

$$\text{POP} = \frac{\text{Jumlah penduduk tahun } t}{\text{Jumlah penduduk tahun } t - 1} - 1 \quad (3.6)$$

Levine dan Renelt (1992) dalam Wibowo (2008) mengutarakan bahwa *population growth* menentukan tingkat kemakmuran ekonomi. Jumlah penduduk yang besar dapat pula mendorong spesialisasi dan meningkatkan pengetahuan di bidang investasi. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam (Wibowo, 2008).

### 3.5.7 Statistik Politik (POL)

Statistik Politik direpresentasikan dengan rasio jumlah anggota DPRD dengan tingkat pendidikan minimal setingkat Sarjana.

$$\text{POL} = \frac{\text{jumlah anggota DPRD dengan tingkat pendidikan minimal setingkat sarjana}}{\text{total jumlah anggota DPRD kabupaten/kota}} \quad (3.7)$$

Akai dan Sakata (2002) menggunakan variabel kontrol dengan proksi berupa rasio jumlah kursi partai demokrat pada *state legislature*. Pendekatan yang digunakan oleh Akai dan Sakata untuk menentukan variabel kontrol tersebut tidak

dapat diterapkan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menggunakan proksi lain yang dapat merepresentasikan kondisi politik di masing-masing kabupaten/kota.

### **3.5.8 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (OPINI)**

Variabel kontrol berupa kualitas pengelolaan keuangan daerah direpresentasikan dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Proksi atas variabel ini menggunakan variabel *dummy* yaitu kode 1 untuk opini WTP dan kode 0 untuk opini selain WTP.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2011) mengenai *flypaper effect* juga menggunakan variabel berupa opini BPK atas LKPD kabupaten/kota dan mengkonversinya menggunakan variabel *dummy* yaitu daerah yang memperoleh opini WTP mendapat kode 1, sedangkan opini lainnya diberi kode 0.

## **3.6 Teknik Analisis Data**

Data diolah dengan bantuan *software* statistik Eviews versi 6. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian berupa variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PDRB, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kemandirian Fiskal. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

Dalam regresi data panel, asumsi model regresi klasik sebagai syarat penggunaan metode OLS yang dapat menghasilkan penduga yang bersifat *Best*

*Linear Unbiased Estimator (BLUE)* tidak dapat diterapkan. Pyndik dan Rubinfeld (1991) dalam Palupi (2009) menyatakan bahwa data panel memiliki 3 macam gangguan yaitu, gangguan antar waktu (*time series related disturbances*), antar individu (*cross section disturbances*), dan gangguan antar waktu antar individu.

Pengujian asumsi dalam analisis data panel berbeda dengan pengujian dalam persamaan tunggal. Misalnya, dalam persamaan tunggal, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi gejala heteroskedastik atau autokorelasi untuk satu individu, sedangkan pengujian dalam analisis data panel dilakukan untuk menentukan estimator yang lebih baik, disesuaikan dengan kondisi matriks *varians-covarian residual*.

### 3.7. Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan biasa digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis data dari hal-hal yang berhubungan dengan angka, dan menggunakan rumus-rumus serta teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang paling baik, dilakukan beberapa tahap prosedur pengolahan data. Data panel menggunakan data yang lebih kompleks dengan jumlah observasi yang rata-rata lebih banyak dibanding *cross section* dan *time series* sehingga diperlukan teknik khusus dalam melakukan pengolahan. Prosedur-prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Estimasi regresi data panel dengan metode *common constant*, *fixed effect* dan *random effect*;
2. Uji signifikansi model *effect common*, *fixed* dan *random*;
3. Menentukan model terbaik terhadap data observasi yang dimiliki;
4. Pemilihan estimator dengan struktur *varians-co-varians residual*;
5. Menilai *Goodness of Fit Model*, melalui indikator-indikator yang akan diterangkan kemudian.

### 3.8 Pendekatan Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan dalam membuat regresi data panel, yaitu sebagai berikut.

#### 3.8.1 *Ordinary Least Square (OLS)*

Teknik yang digunakan dalam metode *Ordinary Least Square* hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu.

Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain (Winarno, 2011).

#### 3.8.2 *Fixed Effects Model*

Pada pendekatan ini, model data panel memiliki intersep yang mungkin berubah-ubah untuk setiap individu dan waktu dimana setiap unit *cross section* bersifat tetap secara *time series*. Secara matematis model data panel dengan pendekatan *Fixed Effect* adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \gamma_2 W_{2t} + \dots + \gamma_N W_{Nt} + \sigma_2 Z_{i2} + \dots + \sigma_T Z_{iT} + e_{it}$$

Di mana:

$Y_{it}$  = variabel terikat untuk individu  $i$  dan waktu  $t$

$X_{it}$  = variabel bebas untuk individu  $i$  dan waktu  $t$

$W$  = variabel dummy untuk individu  $i$

$Z$  = variabel dummy untuk waktu  $t$

$\gamma$  = Koefisien slope variabel dummy untuk individu  $i$

$\sigma$  = Koefisien slope variabel dummy untuk waktu  $t$

Pada *Fixed Effect Model* terdapat beberapa kemungkinan persamaan regresi yang tergantung pada asumsi yang digunakan:

- 1) Intersep dan *slope* dari koefisien tetap sepanjang waktu dan *error term* menangkap perbedaan-perbedaan sepanjang waktu dan individu

- 2) *Slope* dari koefisien tetap, tetapi intersep individu bervariasi
- 3) *Slope* dari koefisien tetap tetapi intersep bervariasi berdasarkan individu maupun waktu
- 4) Seluruh koefisien bervariasi pada individu
- 5) Intersep dan *slope* dari koefisien berbeda pada individu maupun waktu

### 3.8.3 Random Effects Model

Dalam Model *Effect Random* (MER) perbedaan karakteristik individu dan atau waktu diakomodasikan pada *error* dari model. *Error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Karena ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error*, yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada MER juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen individu dan *error* gabungan. Persamaan regresi untuk model *random effects* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta' x_{it} + e_{it}, \text{ dimana } e_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

dimana:

$u_i$  merupakan *error cross section*

$v_t$  merupakan *error time series*

$w_{it}$  merupakan *error gabungan*

## 3.9 Pemilihan Model

### 3.9.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test)

*Likelihood Ratio Test* adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan adalah *Common Constant* atau *Fixed Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi F statistik dimana jika nilai F statistik yang didapat lebih besar daripada nilai F tabel maka  $H_0$  ditolak dengan hipotesis:

$H_0$ : *Common Constant (OLS)* lebih baik daripada *Fixed Effect Model (FEM)*

$H_1$ : *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik daripada *Common Constant (OLS)*

Nilai F statistik dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / n - 1}{(RSS_2) / (nT - n - k)} \quad (3.8)$$

dimana:

$n$ : jumlah individu;

$k$ : jumlah parameter dalam model *fixed effects*;

RSS1 : *residual sum of squares model common effect*;

RSS2: *residual sum of squares model fixed effect*.

### 3.9.2 Hausman Test

Rosadi (2012) menyatakan bahwa *Hausman Test* bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random di dalam panel data. Dari hasil pengujian ini, maka dapat diketahui apakah model *fixed effects* lebih baik dari model *random effects*. Formula untuk *Hausman Test* adalah:

$$W = \chi^2 [K - 1] = [b - \hat{\beta}] \hat{\psi}^{-1} [b - \hat{\beta}] \quad (3.9)$$

dimana  $\psi$  adalah estimasi kovarians matriks dalam model *random effect*.

Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* pada derajat bebas ( $k-1$ ) dengan hipotesis:

$H_0$ : *Random Effect Model (REM)* lebih baik daripada *Fixed Effect Model (FEM)*

$H_1$ : *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik daripada *Random Effect Model (REM)*

Jika nilai *chi-square* statistik yang didapat lebih besar daripada nilai *chi-square* tabel, maka  $H_0$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* lebih baik.

### 3.9.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier (LM)* dilakukan untuk melakukan pemilihan estimator dengan struktur *Varians-Covarians Residual* Homoskedastisitas atau Heteroskedastisitas. Hipotesis nul ( $H_0$ ) yang digunakan dalam pengujian ini adalah struktur *varians-covarians* bersifat homoskedastis dan hipotesis alternatifnya ( $H_1$ ) adalah *varians-covarians* bersifat heteroskedastisitas. Statistik uji yang digunakan adalah:

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\hat{\sigma}_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1 \right]^2 \quad (3.10)$$

Dimana  $T$  adalah jumlah observasi,  $n$  adalah jumlah individu,  $\hat{\sigma}_i^2$  adalah varians residual persamaan ke- $i$  pada kondisi homoskedastisitas, dan  $\hat{\sigma}^2$  adalah *sum*

**Universitas Indonesia**

*square error* persamaan sistem pada kondisi homoskedastik. Statistik uji ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas  $n-1$ . Jika nilai statistik LM yang dihasilkan lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul akan ditolak, yang artinya struktur *varians-covarians residual* bersifat heteroskedastik.

### 3.10 Analisis Regresi

Setelah pemilihan model, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi. Analisis regresi memiliki tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan variabel bebas yang diketahui. Selain itu, analisis regresi juga berfungsi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta menunjukkan arah hubungan tersebut. Pengujian hipotesis memiliki indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan, yaitu :

Analisis regresi dengan Uji Statistika F dan Uji Statistika t berguna untuk menguji tingkat signifikansi. Semakin tinggi tingkat signifikansi, semakin cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat.

#### 3.10.1 Uji Statistika F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

Pengujian ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama. Hasil F-hitung dibandingkan dengan F-tabel. Nilai F-tabel diperoleh dari derajat bebas dengan perhitungan  $n-k-1$  (dimana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas). Pengujian ini dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran 5% atau 1%. Jika probabilitas yang ditunjukkan  $> 5\%$ , maka model ditolak, sedangkan jika  $< 5\%$ , maka model diterima.

### 3.10.2 Uji Statistika t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, termasuk intersep, secara individu. Nilai t dibandingkan dengan nilai  $t_{\alpha}$ . Jika  $|t| > t_{\alpha}$ , maka artinya hipotesis tersebut terbukti signifikan secara statistik, atau dapat pula membandingkan nilai probabilitas dengan taraf nyata 5% atau 1%.

### 3.10.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

### 3.10.4 Uji Regresi Palsu (*Spurious Regression*)

Untuk meningkatkan keyakinan atas model regresi, perlu dilakukan uji regresi palsu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi penelitian ini apakah palsu atau tidak dengan membandingkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan nilai *Durbin Watson* (DW). Apabila  $R^2$  lebih besar daripada DW maka model yang digunakan dapat dikatakan palsu.

## BAB 4

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui karakteristik data sampel secara umum, pada bagian ini akan dideskripsikan data masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Maximum	Minimum	Std. Deviation
PDRB	275	0.049905	0.109000	0.004600	0.014890
BM	275	0.188723	0.576034	0.038454	0.074113
DP	275	0.800768	0.910559	0.474854	0.078961
KF	275	0.101614	0.408096	0.042407	0.049378
LnHDI	275	4.260925	4.370586	4.100327	0.054172
OPINI	275	0.032727	0.000000	1.000000	0.178246
POP	275	0.008303	0.151976	-0.311287	0.035603
POL	275	0.542003	0.888889	0.272727	0.128652

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012

Jumlah obyek penelitian ada 275 data, yang terdiri atas data *cross section* sebanyak 55 kabupaten/kota dan data *timeseries* sebanyak 5 tahun. Berdasarkan data statistik deskriptif di atas diketahui terdapat satu variabel dependen yaitu laju pertumbuhan PDRB (PDRB), tiga variabel independen yaitu Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP), dan Kemandirian Fiskal (KF), serta empat variabel kontrol antara lain *Human Development Index* (HDI) yang kemudian ditransformasi menjadi log natural *Human Development Index* (LnHDI), Opini BPK atas LKPD (OPINI), Pertumbuhan Penduduk (POP), dan Statistik Politik (POL).

Berdasarkan statistik deskriptif di atas, diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari 275 data tersebut adalah 0,049905 (4,9905%), dengan nilai laju

pertumbuhan tertinggi sebesar 0,1090 (10,90%) dan nilai terendah 0,0046 (0,46%), serta standar deviasi sebesar 0,014890.

Variabel independen yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP), dan Kemandirian Fiskal (KF). Data statistik deskriptif atas variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja modal dibandingkan total belanja daerah adalah 0.188723 (18,87%), dengan nilai rasio tertinggi sebesar 0,576034 (57,60%) dan terendah sebesar 0.038454 (3,85%).

Nilai rata-rata rasio Dana Perimbangan (DP) terhadap total Pendapatan Daerah adalah 0,800768 (80,0768%), dengan nilai rasio tertinggi sebesar 0.910559 (91,06%) dan nilai terendah sebesar 0,474854 (47,49%). Statistik deskriptif atas data kemandirian fiskal menunjukkan nilai rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Belanja Daerah sebesar 0,101614 (10,16%), dengan nilai tertinggi sebesar 0,408096 (40,81%) dan nilai terendah sebesar 0,042407 (4,24%).

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Human Development Index* (HDI) yang kemudian ditransformasi menjadi Log Natural *Human Development Index* (LnHDI), Opini BPK atas LKPD (OPINI), Pertumbuhan Penduduk (POP), dan Statistik Politik (POL).

Variabel HDI ditransformasikan menjadi Log Natural HDI berdasarkan dua pertimbangan yaitu satuan variabel HDI (indeks) yang berbeda dengan variabel lain (%) dan tingginya nilai HDI dibandingkan nilai variabel lain. Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Log Natural *Human Development Index* sebesar 4,260925, dengan nilai tertinggi sebesar 4,370586 dan nilai terendah sebesar 4,100327.

Variabel Opini yang menunjukkan opini WTP (kode 1) atau opini selain WTP (kode 0) diperoleh data statistik deskriptif berupa nilai rata-rata sebesar 0,32727 (3,27%) yang berarti 3,27% dari total 275 LKPD memperoleh opini WTP dari BPK, dan sisanya sebesar 96,73% LKPD memperoleh opini selain WTP.

Variabel Pertumbuhan Penduduk (POP) menunjukkan data statistik deskriptif berupa nilai rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,008303 (0,83%) dengan nilai pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 0,151976 (15,20%) dan terendah sebesar -0,311287 (-31,13%). Variabel Statistik Politik (POL) dengan proksi rasio anggota

DPRD Kabupaten/Kota dengan tingkat pendidikan minimal setingkat Sarjana menunjukkan data statistik deskriptif berupa nilai rata-rata sebesar 0,542003 (54,20%), dengan nilai tertinggi sebesar 0,888889 (88,89%) dan nilai terendah sebesar 0,272727 (27,27%).

#### 4.2 Hasil Regresi Data Panel

Berikut ini akan dijelaskan hasil regresi data panel dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu *Ordinary Least Square (OLS)*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

##### 4.2.1 Ordinary Least Square (OLS)

Hasil pengujian regresi data panel dengan model *Ordinary Least Square* akan dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2  
*Estimation Output Hasil Regresi OLS*

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	-0.024236	0.012290	-1.971961	0.0496
DP?	-0.026982	0.014616	-1.846104	0.0660
KF?	0.047661	0.025302	1.883658	0.0607
LN_HDI?	0.014453	0.003392	4.260252	0.0000
OPINI?	-0.002788	0.005052	-0.551837	0.5815
POP?	0.044146	0.024559	1.797565	0.0734
POL?	0.017247	0.006929	2.489323	0.0134
R-squared	0.135360	Mean dependent var	0.049905	
Adjusted R-squared	0.116003	S.D. dependent var	0.014890	
S.E. of regression	0.014000	Akaike info criterion	-5.674445	
Sum squared resid	0.052525	Schwarz criterion	-5.582382	
Log likelihood	787.2362	Hannan-Quinn criter.	-5.637498	
Durbin-Watson stat	0.367145			

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 11,6%. Nilai koefisien determinasi dengan model OLS ini dinilai masih sangat kecil. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* yang kecil yaitu 0,367145.

#### 4.2.2 Fixed Effect Model

Hasil pengujian regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model* akan dijelaskan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3  
*Estimation Output Hasil Regresi Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.272878	0.246872	-1.105342	0.2703
BM?	-0.006057	0.006589	-0.919333	0.3590
DP?	-0.007477	0.012814	-0.583513	0.5602
KF?	-0.029811	0.025248	-1.180701	0.2390
LN_HDI?	0.078810	0.056224	1.401715	0.1625
OPINI?	-0.000405	0.002766	-0.146288	0.8838
POP?	0.001488	0.011101	0.134060	0.8935
POL?	-0.005274	0.005362	-0.983543	0.3265
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.882527	Mean dependent var	0.049905	
Adjusted R-squared	0.848884	S.D. dependent var	0.014890	
S.E. of regression	0.005788	Akaike info criterion	-7.270547	
Sum squared resid	0.007136	Schwarz criterion	-6.455129	
Log likelihood	1061.700	Hannan-Quinn criter.	-6.943296	
F-statistic	26.23241	Durbin-Watson stat	2.420762	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 84,89%. Nilai koefisien determinasi dengan *fixed effect model* ini dinilai sudah cukup baik. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* yang tinggi yaitu 2,420762.

Hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* juga menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian ini. Rincian pengaruh individu dari data *cross section* terdapat pada lampiran 3.

### 4.2.3 Random Effect Model.

Hasil pengujian regresi data panel dengan model *Random Effect Model* akan dijelaskan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4  
*Estimation Output Hasil Regresi Random Effect Model*

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.125593	0.126550	0.992435	0.3219
BM?	-0.005653	0.006416	-0.880950	0.3791
DP?	-0.028744	0.010039	-2.863109	0.0045
KF?	0.004604	0.020698	0.222423	0.8242
LN_HDI?	-0.012144	0.028688	-0.423322	0.6724
OPINI?	-0.001152	0.002704	-0.425936	0.6705
POP?	0.005752	0.011031	0.521457	0.6025
POL?	-0.000619	0.004955	-0.124940	0.9007
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.011244	0.7905
Idiosyncratic random			0.005788	0.2095
Weighted Statistics				
R-squared	0.049983	Mean dependent var		0.011196
Adjusted R-squared	0.025076	S.D. dependent var		0.006118
S.E. of regression	0.006040	Sum squared resid		0.009742
F-statistic	2.006784	Durbin-Watson stat		1.787066
Prob(F-statistic)	0.054520			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.093383	Mean dependent var		0.049905
Sum squared resid	0.055075	Durbin-Watson stat		0.316098

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 2,51%. Nilai koefisien determinasi dengan *random effect model* ini dinilai sangat kecil. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* yang cukup tinggi yaitu 1,787066.

Hasil regresi data panel dengan menggunakan *random effect model* juga menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian ini. Rincian pengaruh individu dari data *cross section* terdapat pada lampiran 4.

### 4.3 Pemilihan Model

#### 4.3.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test)

*Likelihood Ratio Test* dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* atau *Common Constant*. Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-stat dengan hipotesis:

$H_0$ : *Common Constant (OLS)* lebih baik daripada *Fixed Effect Model (FEM)*

$H_1$ : *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik daripada *Common Constant (OLS)*

Hasil *Likelihood Ratio Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	22.814402	(54,213)	0.0000	
Cross-section Chi-square	526.503173	54	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: PDRB?				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.401158	0.084227	4.762844	0.0000
BM?	-0.024454	0.011821	-2.068595	0.0395
DP?	-0.066984	0.016376	-4.090399	0.0001
KF?	0.049330	0.024339	2.026751	0.0437
LN_HDI?	-0.071564	0.018352	-3.899446	0.0001
OPINI?	-0.003163	0.004860	-0.650949	0.5156
POP?	0.044844	0.023622	1.898390	0.0587
POL?	0.012265	0.006746	1.818123	0.0702
R-squared	0.203069	Mean dependent var	0.049905	
Adjusted R-squared	0.182175	S.D. dependent var	0.014890	
S.E. of regression	0.013465	Akaike info criterion	-5.748717	
Sum squared resid	0.048412	Schwarz criterion	-5.643502	
Log likelihood	798.4486	Hannan-Quinn criter.	-5.706491	
F-statistic	9.719307	Durbin-Watson stat	0.405504	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui nilai *cross-section F* statistik adalah sebesar 22,814402. Dengan membandingkan nilai F statistik (22,814402) yang lebih

besar daripada nilai F tabel (1,398), maka kesimpulan dari hasil pengujian adalah menolak  $H_0$ .

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa probabilitas adalah sebesar 0,0000. Dengan nilai p-value yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka kesimpulan dari hasil *Likelihood Ratio Test* adalah menolak  $H_0$ , sehingga model yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

### 4.3.2 Hausman Test

*Hausman Test* digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis:

$H_0$ : *Random Effect Model (REM)* lebih baik daripada *Fixed Effect Model (FEM)*

$H_1$ : *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik daripada *Random Effect Model (REM)*

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Hasil Pengujian *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.766556	7	0.0001
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.882527	Mean dependent var	0.049905
Adjusted R-squared	0.848884	S.D. dependent var	0.014890
S.E. of regression	0.005788	Akaike info criterion	-7.270547
Sum squared resid	0.007136	Schwarz criterion	-6.455129
Log likelihood	1061.700	Hannan-Quinn criter.	-6.943296
F-statistic	26.23241	Durbin-Watson stat	2.420762
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai *chi square* sebesar 30,766556. Dengan membandingkan nilai *chi square table* ( $\alpha = 0,05$ ,  $n=5$ ) yaitu 11,07048 dan nilai *chi square* hasil pengujian, maka diperoleh kesimpulan menolak  $H_0$  karena nilai *chi square* hasil pengujian lebih besar dari nilai *chi square table*. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka pendekatan yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

### 4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan untuk menentukan struktur *varians-covarians* dalam penelitian ini bersifat homoskedastis atau heterokedastis. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis:

$H_0$ : struktur varians-covarians bersifat homoskedastis

$H_1$ : struktur varians-covarians bersifat heteroskedastis

Hasil uji LM sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 6 adalah sebagai berikut:

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\hat{\sigma}_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = 132.68$$

Dengan  $\alpha = 0,05$  dan derajat bebas =  $n-1 = 54$ , maka diketahui nilai *chi square* tabel adalah sebesar 72,153. Dengan membandingkan nilai *chi square* hasil uji LM (132,68) yang lebih tinggi dari nilai *chi square* tabel, maka kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah menolak  $H_0$ . Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur *varians-covarians residual* bersifat heteroskedastik.

Untuk mengatasi masalah struktur *varians-covarians residual* yang bersifat heteroskedastik, maka harus dilakukan regresi berikutnya dengan mempergunakan model regresi *fixed effect cross sectional weighth*.

Hasil regresi *fixed effect cross sectional weighth* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7  
Hasil Regresi *fixed effect cross sectional weighth*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.310244	0.112239	-2.764127	0.0062
BM?	-0.005314	0.002892	-1.837689	0.0675
DP?	-0.002735	0.005011	-0.545822	0.5858
KF?	-0.025921	0.010527	-2.462247	0.0146
LN_HDI?	0.086492	0.025724	3.362382	0.0009
OPINI?	0.000448	0.000951	0.471124	0.6380
POP?	-0.002670	0.005974	-0.446857	0.6554
POL?	-0.004713	0.002072	-2.274049	0.0240
Effects Specification				

Weighted Statistics			
R-squared	0.992345	Mean dependent var	0.097000
Adjusted R-squared	0.990153	S.D. dependent var	0.080660
S.E. of regression	0.005754	Sum squared resid	0.007053
F-statistic	452.6543	Durbin-Watson stat	2.271506
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.882308	Mean dependent var	0.049905
Sum squared resid	0.007150	Durbin-Watson stat	2.427030

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Analisis hasil regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect cross sectional weight* akan dibahas pada subbab berikutnya. Hasil regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect cross sectional weight* menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian ini. Rincian pengaruh individu dari data *cross section* terdapat pada lampiran 5.

#### 4.4 Analisis Hasil Regresi

##### 4.4.1 Uji Statistika F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama. Hasil F-statistik dibandingkan dengan F-tabel. Pengujian ini dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran 5% atau 1%. Jika probabilitas yang ditunjukkan > 5%, maka model ditolak, sedangkan jika < 5%, maka model diterima.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *fixed effect cross sectional weight* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 452.6543 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. Dengan melihat perbandingan nilai probabilitas (F-statistik) yang lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen dan variabel kontrol) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

##### 4.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dinotasikan dengan  $R^2$ . Koefisien ini merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Namun, banyak penelitian menganjurkan untuk

menggunakan nilai *adjusted R*<sup>2</sup> karena tidak seperti *R*<sup>2</sup>, nilai *adjusted R*<sup>2</sup> dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *fixed effect cross sectional weigth* menghasilkan nilai *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,990153 (99,01%) yang berarti bahwa sebanyak 99,01% variasi atau perubahan pada laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yang ada, sedangkan sisanya (0,99 %) dijelaskan sebab yang lain di luar model yang ada dalam penelitian ini.

#### 4.4.3 Uji Statistika t

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, termasuk intersep, secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji statistik t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh individual masing-masing variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Selain menguji signifikansi dengan *probability (t-stat)* yang ditunjukkan dalam tabel 4.6 dengan  $\alpha$  sebesar 5%, juga dilakukan uji arah atas nilai koefisiennya.

Hasil pengujian regresi atas model penelitian ini menunjukkan beberapa variabel bebas dinilai signifikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu KF (prob = 0,0146), LnHDI (prob = 0,0009), dan POL (prob = 0,0240).

Beberapa variabel bebas dinilai tidak berpengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas di atas 0,05, yaitu BM (prob = 0,0675), DP (prob = 0,5858), OPINI (prob = 0,6380), dan POP (prob = 0,6554).

Secara keseluruhan, model dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & -0,310244 - 0,005314 \text{ BM} - 0,002735 \text{ DP} - 0,025921 \text{ KF} \\ & + 0,086492 \text{ LnHDI} + 0,000448 \text{ OPINI} - 0,002670 \text{ POP} \\ & - 0,004713 \text{ POL} + E \end{aligned} \quad (4.1)$$

Dari persamaan 4.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar -0,310244 menunjukkan jika tidak ada variabel independen (nilai=0), maka laju pertumbuhan PDRB tetap akan ada sebesar -0,310244%. Koefisien regresi BM adalah 0,005314 negatif yang mengindikasikan bahwa setiap penambahan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah sebesar 1% maka laju pertumbuhan PDRB akan berkurang sebesar 0,005314%.

Koefisien regresi untuk variabel DP adalah negatif 0,002735 yang berarti bahwa setiap penambahan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 1% maka laju pertumbuhan PDRB akan berkurang sebesar 0,002735%. Sedangkan koefisien KF adalah negatif 0,025921 yang berarti bahwa setiap penambahan rasio PAD terhadap total belanja daerah sebesar 1% maka laju pertumbuhan PDRB akan berkurang sebesar 0,0025921%.

Koefisien regresi atas variabel LnHDI adalah positif 0,086492 yang berarti bahwa setiap penambahan nilai LnHDI sebesar 1 poin maka laju pertumbuhan PDRB akan bertambah sebesar 0,086492%. Variabel OPINI memiliki koefisien regresi positif 0,000448 yang berarti bahwa kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian akan menambah nilai laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,000448%.

Variabel POP memiliki koefisien regresi negatif 0,002670 yang berarti setiap penambahan persentase pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1% maka laju pertumbuhan PDRB akan berkurang sebesar 0,002670%. Koefisien regresi atas variabel POL adalah negatif 0,004713 yang berarti bahwa setiap penambahan rasio jumlah anggota DPRD dengan tingkat pendidikan minimal setingkat sarjana sebesar 1% maka laju pertumbuhan PDRB akan berkurang sebesar 0,004713.

#### 4.4.4 Uji Regresi Palsu (*Spurious Regression*)

Pengujian regresi palsu dilakukan untuk mengetahui apakah regresi penelitian ini palsu atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan nilai *Durbin Watson* (DW). Apabila  $R^2$  lebih besar daripada DW maka model yang digunakan dapat dikatakan palsu.

Hasil uji regresi dalam tabel 4.6 menunjukkan nilai *Durbin Watson-stat* yang lebih besar daripada nilai  $R^2$  ( $2.271506 > 0.992345$ ). Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut bukanlah regresi palsu sehingga hasil analisis semakin mendekati keadaan sesungguhnya.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis

Berikut akan dijabarkan hasil pengujian atas keempat hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### 4.5.1 Hipotesis 1: Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari pengujian regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Hasil Regresi *fixed effect cross sectional weighth* – Variabel BM

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	-0.005314	0.002892	-1.837689	0.0675

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa angka probabilitas untuk variabel belanja modal sebesar 0,0675. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB. Koefisien regresi untuk belanja modal adalah negatif 0,005314. Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Anasmen (2009) yang menyatakan bahwa belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun berbeda arah koefisien yaitu positif.

#### 4.5.2 Hipotesis 2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil pengujian regresi data panel atas hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9  
 Hasil Regresi *fixed effect cross sectional weigth* – Variabel DP

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DP?	-0.002735	0.005011	-0.545822	0.5858

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa angka probabilitas untuk variabel dana perimbangan sebesar 0,5858. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB. Koefisien regresi untuk dana perimbangan adalah negatif 0,002735. Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Pusporini (2006) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian Indarto (2011) juga menyatakan bahwa pengaruh belanja transfer ke daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu pada provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki pengaruh positif, sedangkan pada provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah mempunyai nilai negatif.

#### 4.5.3 Hipotesis 3: Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kemandirian fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil pengujian regresi data panel atas hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10  
 Hasil Regresi *fixed effect cross sectional weigth* – Variabel KF

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KF?	-0.025921	0.010527	-2.462247	0.0146

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa angka probabilitas untuk variabel kemandirian fiskal sebesar 0,0146. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal secara individual berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB. Koefisien regresi untuk kemandirian fiskal adalah negatif 0,025921. Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat diterima.

Hasil pengujian ini bertentangan dengan hasil penelitian Wibowo (2008) yang menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal dengan proksi rasio PAD terhadap total belanja daerah secara statistik kurang signifikan dalam menjelaskan perbedaan performa ekonomi antar propinsi dengan koefisien regresi negatif.

#### 4.5.4 Hipotesis 4: Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal secara bersama-sama berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah

Pada hipotesis keempat ini ingin diketahui pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan menambahkan empat variabel kontrol dalam pengujian statistik. Hasil pengujian regresi data panel atas hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11  
 Hasil Regresi *fixed effect cross sectional weighth*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.310244	0.112239	-2.764127	0.0062
BM?	-0.005314	0.002892	-1.837689	0.0675
DP?	-0.002735	0.005011	-0.545822	0.5858
KF?	-0.025921	0.010527	-2.462247	0.0146
LN_HDI?	0.086492	0.025724	3.362382	0.0009
OPINI?	0.000448	0.000951	0.471124	0.6380
POP?	-0.002670	0.005974	-0.446857	0.6554
POL?	-0.004713	0.002072	-2.274049	0.0240
Effects Specification				
Weighted Statistics				
R-squared	0.992345	Mean dependent var	0.097000	
Adjusted R-squared	0.990153	S.D. dependent var	0.080660	
S.E. of regression	0.005754	Sum squared resid	0.007053	
F-statistic	452.6543	Durbin-Watson stat	2.271506	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.882308	Mean dependent var	0.049905	
Sum squared resid	0.007150	Durbin-Watson stat	2.427030	

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews v.6, 2012.

Hasil pengujian regresi menunjukkan nilai Prob (F-statistik) sebesar 0,000000 (lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB.

Signifikansi dan koefisien regresi atas variabel BM, DP, dan KF telah dijelaskan pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan PDRB pada hipotesis sebelumnya.

Variabel LnHDI dengan nilai probabilitas sebesar 0,0009 memiliki koefisien regresi positif 0,086492. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Human Development Index* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian Widhiyanto (2008) tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan variabel kontrol berupa HDI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi yang negatif. HDI dinilai sebagai variabel kontrol yang buruk dikarenakan tingginya *gap* atau perbedaan HDI antara daerah kaya dengan daerah miskin.

Variabel OPINI memiliki koefisien regresi positif 0,000448 dengan nilai probabilitas sebesar 0,6380. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Opini BPK atas LKPD tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Variabel POP memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6554 dan koefisien regresi negatif 0,002670. Hasil pengujian tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk (POP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa persentase peningkatan jumlah penduduk berhubungan secara positif terhadap performa ekonomi meskipun nilainya tidak signifikan setidaknya pada level 10%.

Variabel POL memiliki koefisien regresi negatif 0,004713 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0240. Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik politik (POL) dengan proksi rasio anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tingkat pendidikan minimal setingkat Sarjana secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesimpulan di atas sesuai dengan penelitian Akai dan Sakata (2002) tentang desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa statistik politik signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi negatif. Proksi yang digunakan adalah rasio jumlah anggota Partai Demokrat pada *state legislature* yang menunjukkan tendensi kebijakan politik di suatu daerah apakah liberal atau konservatif.

Tabel 4.12 berikut akan menjelaskan ringkasan pengaruh variabel bebas terhadap variabel laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 4.12  
Ringkasan Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel PDRB

Variabel	Arah Pengaruh	Signifikansi
BM	Negatif (-)	Tidak Signifikan
DP	Negatif (-)	Tidak Signifikan
KF	Negatif (-)	Signifikan
LnHDI	Positif (+)	Signifikan
OPINI	Positif (+)	Tidak Signifikan
POP	Negatif (-)	Tidak Signifikan
POL	Negatif (-)	Signifikan

#### 4.6 Pembahasan

Sidik (2003) menjelaskan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pengaturan kelembagaan dan disain menyeluruh dari pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Implementasi desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif terhadap distribusi pendapatan masyarakat melalui kebijakan pengeluaran, kebijakan fiskal dan disain sumbangan pemerintah pusat kepada daerah yang lebih menekankan pada kebijakan pengurangan kesenjangan antar daerah (Bird dan Chen, 1998).

Pemerintah daerah sebagai otoritas yang berkuasa penuh atas pengelolaan APBD diharapkan dapat memanfaatkan APBD sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini mencoba untuk membahas sejauh mana pengaruh komponen APBD terutama mengenai Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara teoritis, kebijakan belanja pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, semakin besar nilai belanja modal semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (DJPK, 2011).

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan karena porsi belanja modal pemerintah yang tidak terlalu besar, di mana sebagian besar belanja pemerintah dialokasikan untuk belanja pegawai. Selain itu, berdasarkan data realisasi APBD tahun anggaran 2010 diketahui bahwa alokasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan hanya sebesar 46,96%, dan sisanya digunakan untuk belanja modal yang terkait dengan urusan pemerintahan seperti peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan.

Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan alokasi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan di mana hal tersebut sangat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut karena memiliki efek *multiplier* yang cukup besar.

Pengalokasian dan bantuan kepada daerah dari pemerintah pusat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah, mengupayakan keseimbangan bantuan antar daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih merata dan dapat meningkatkan upaya pengumpulan PAD, yang pada gilirannya dapat lebih berperan untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya sendiri (Ahmad, 1990).

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penjelasan atas hasil penelitian ini adalah komposisi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah sebagian besar berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya sebagian besar untuk membiayai gaji pegawai. Data realisasi APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2010 menunjukkan bahwa DAU mendapatkan porsi 63,24%, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus terutama untuk peningkatan pelayanan publik hanya sebesar 6,80%.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan agar pemerintah pusat dapat memperbaiki kriteria perhitungan DAU terutama untuk menghitung celah fiskal sehingga dapat diperoleh hasil perhitungan DAU yang benar-benar sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, diharapkan pemerintah pusat dapat meningkatkan porsi DAK kepada daerah dengan fokus alokasi diutamakan peningkatan pelayanan publik yang terkait dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Ukuran ketimpangan sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dikenal sebagai rasio sentralisasi (*centralization ratio*). Proporsi ini menggambarkan bagian fungsi pemerintahan yang dibiayai dari masing-masing tingkat pemerintahan, yaitu pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Ketimpangan sumber penerimaan dan pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut memberikan indikasi tingkat sentralisasi dari pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia (Sidik, 2003).

Ismail (2003) menjelaskan bahwa kondisi ideal dari suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama, sementara

transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung yang peranannya kurang berarti.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dengan proksi rasio PAD terhadap total belanja daerah dinilai berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi dengan arah yang negatif.

Analisis atas hasil penelitian ini adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri melalui PAD meskipun masih kecil namun berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di mana suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kondisi PAD pemerintah daerah berdasarkan data realisasi APBD tahun 2010 menunjukkan porsi yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 19,01% dari total pendapatan daerah. Komposisi PAD paling dominan berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sebesar 79,12%, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 4,79%.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan menggali sumber-sumber keuangan yang potensial di daerahnya. Penyempurnaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 memberikan tambahan kewenangan kepada daerah dalam menggali potensi keuangan daerah dengan adanya penyerahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) serta BPHTB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penyempurnaan lain dalam UU PDRD adalah diberlakukannya sistem *closed list* untuk jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, namun disertai dengan perluasan basis pajak dan pemerintah daerah diberikan diskresi untuk menentukan tarif pajak dengan batasan yang telah ditetapkan. Dengan penyempurnaan sistem perpajakan daerah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih cerdas dan bijak dalam membuat peraturan tentang pajak daerah sehingga bisa mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan PAD sekaligus dapat menjadi insentif bagi para investor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyempurnaan sistem perpajakan daerah sebagaimana dijelaskan oleh Hidayanto (2003) harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum serta mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah yang baik. Penyederhanaan sistem perpajakan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria antara lain objek dan dasar pengenaan pajaknya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, potensi memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan. Di samping itu, penyederhanaan pungutan retribusi dilakukan dengan memperkuat landasan pemungutan yaitu mengaitkan pungutan dengan layanan yang diberikan dan pemberian izin tertentu.

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dengan meningkatkan kinerja maupun membuka BUMD baru. Melalui optimalisasi BUMD setidaknya pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan melalui pembagian dividen, ikut menggerakkan roda perekonomian sektor riil, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Konsep *Human Development Index* (HDI) adalah representasi dari capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, seperti kualitas kesehatan, pendidikan, serta perekonomian.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel LnHDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melihat komponen perhitungan HDI dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi salah satu unsur penunjang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka sebaiknya pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya dengan mengalokasikan belanja yang lebih tinggi untuk keperluan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.

Bird, et al (2001) dalam Sidik (2003) menjelaskan bahwa daerah harus mengelola keuangannya sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan terbuka untuk diaudit secara berkala sebagai bagian dari upaya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang lebih baik. Opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK dapat menjadi representasi dari kualitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa opini BPK atas LKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penjelasan atas hasil penelitian ini adalah karena sedikitnya daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu tercatat hanya berjumlah 9 LKPD (3%) dari total 275 LKPD.

Dengan memperhatikan koefisien regresi yang bernilai positif maka diharapkan dengan membaiknya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Levine dan Renelt (1992) dalam Wibowo (2008) mengutarakan bahwa pertumbuhan penduduk menentukan tingkat kemakmuran ekonomi. Jumlah penduduk yang besar dapat pula mendorong spesialisasi dan meningkatkan pengetahuan di bidang investasi.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi namun dengan arah yang negatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan hak *budget* memiliki pengaruh yang penting dalam penentuan alokasi belanja pemerintah daerah. DPRD diharapkan menjadi lembaga yang dapat meneliti dan menilai prioritas belanja daerah sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah untuk selanjutnya disahkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia dari anggota DPRD dinilai cukup berpengaruh dalam penggunaan hak *budget* tersebut.

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa statistik politik berupa kualitas SDM anggota DPRD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hak *budget* yang dimiliki oleh DPRD akan menjadi semakin bermanfaat ketika hak tersebut digunakan oleh anggota DPRD yang mengerti prioritas kebutuhan belanja sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kualitas SDM anggota DPRD menjadi suatu hal yang penting ketika mereka melakukan pembahasan APBD dengan pemerintah, sehingga APBD yang disetujui benar-benar memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terhadap hipotesis yang disusun, sebagaimana telah dibahas dalam Bab 4, penulis memberikan kesimpulan yang dijabarkan seperti di bawah ini.

- a. Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diduga disebabkan karena porsi belanja modal pemerintah yang tidak terlalu besar. Selain itu, diketahui bahwa alokasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan hanya sebesar 46,96%, dan sisanya digunakan untuk belanja modal yang terkait dengan urusan pemerintahan seperti peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan.
- b. Pengalokasian dan bantuan kepada daerah dari pemerintah pusat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah, mengupayakan keseimbangan bantuan antar daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih merata. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penjelasan atas hasil penelitian ini adalah komposisi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah sebagian besar berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya sebagian besar untuk membiayai gaji pegawai, sedangkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus terutama untuk peningkatan pelayanan publik masih sangat kecil.
- c. Ismail (2003) menjelaskan bahwa kondisi ideal dari suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dengan proksi rasio PAD terhadap total belanja daerah dinilai berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi dengan arah yang negatif.

Analisis atas hasil penelitian ini adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri melalui PAD meskipun masih kecil namun berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- d. Bird dan Chen (1998) menyatakan bahwa implementasi desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa belanja modal, dana perimbangan kemandirian fiskal secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB. Dari hasil pengujian tersebut bisa disimpulkan bahwa APBD sebagai salah satu alat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dinilai sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Hasil pengujian menyatakan bahwa *Human Development Index* dan statistik politik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
- f. Hasil pengujian menyatakan bahwa opini BPK atas LKPD dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan kemandirian Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada kabupaten/kota di pulau Jawa. Namun dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mencoba menganalisis komponen APBD namun hanya terbatas pada PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan. Untuk ke depan sebaiknya ditambah dengan variabel lain yang berasal dari komponen APBD sehingga diharapkan dapat memberikan model penelitian yang lebih baik;
- b. Objek penelitian terbatas pada kabupaten/kota di pulau Jawa, sehingga kesimpulan yang diperoleh belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Keterbatasan data penelitian, terutama terkait data statistik politik yang mengakibatkan banyaknya sampel yang harus dihilangkan dari populasi awal;

- d. Variabel kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan proksi opini BPK atas LKPD dinilai tidak terlalu signifikan karena pembagian dalam kelompok opini WTP dan non WTP, di mana LKPD yang memperoleh opini WTP masih sangat sedikit;
- e. Penelitian ini hanya fokus pada faktor kuantitatif atas pengaruh komponen APBD, belum meneliti faktor kualitatif sehingga belum dapat diketahui efektivitas dari Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal.

### **5.3. Saran**

#### **5.3.1 Untuk Pemerintah**

- a. Pemerintah daerah dapat memberikan alokasi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan di mana hal tersebut sangat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di daerah;
- b. Pemerintah pusat dapat memperbaiki kriteria perhitungan DAU terutama untuk menghitung celah fiskal sehingga dapat diperoleh hasil perhitungan DAU yang benar-benar sesuai kebutuhan daerah;
- c. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi DAK kepada daerah dengan fokus alokasi diutamakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang terkait dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat;
- d. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan menggali sumber-sumber keuangan yang potensial di daerahnya, melalui:
  - 1. Optimalisasi penggalan potensi keuangan daerah terutama adanya penyerahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) serta BPHTB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
  - 2. Penyempurnaan sistem perpajakan daerah dengan mempertimbangkan kriteria antara lain objek dan dasar pengenaan pajaknya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan;
  - 3. penyederhanaan pungutan retribusi dilakukan dengan memperkuat landasan pemungutan yaitu mengaitkan pungutan dengan layanan yang diberikan dan pemberian izin tertentu;

4. optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dengan meningkatkan kinerja maupun membuka BUMD baru.
- e. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya dengan mengalokasikan belanja yang lebih tinggi untuk keperluan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat;
- f. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

### **5.3.2 Untuk Peneliti Lain**

- a. Analisis dalam penelitian ini baru sebagian kecil dari komponen APBD, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain terkait komponen APBD yang belum dibahas dalam penelitian ini;
- b. Analisis dalam penelitian kali ini hanya berdasarkan data kuantitatif, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dikaji lebih mendalam terkait aspek kualitatif sehingga dapat dinilai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD;

## DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengembangan Wilayah, Konsep dan Teori*. Graha Ilmu. 2008
- Akai, N., & Sakata M.. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, LII:93-108.
- Anasmen. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006*. Tesis Program MPKP. Universitas Indonesia. 2009
- Darmawan, M. Harestya. *Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2005-2009*. Skripsi Akuntansi FE. Universitas Indonesia. 2011
- Dartanto, Teguh, & Bambang P. S. Brojonegoro. Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas antar Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Retrieved January 25, 2012, from [www.perpustakaan.depkeu.go.id](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id) .
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Buku Pegangan 2011: Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2011.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Departemen Keuangan, 2003.
- Fakultas ISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung. *Prosiding Workshop Internasional: Implementasi Desentralisasi Fiskal Sebagai Upaya*

- Memberdayakan Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah.* Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2002.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS.* Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2006.
- Gujarati, Damodar, & Sumarno Zain. *Ekonometrika Dasar.* Penerbit Erlangga, 1978.
- Gunalp, Burak, & Timur Han Gur. Government Expenditures and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from a Panel Data Analysis. *METU Studies in Development* 29:3-4 (2002). 311-332. Retrieved January 26, 2012, from ABI/Inform Global.
- Halim, Abdul, & Theresia Damayanti. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah.* UPP STIM YKPN. 2001.
- Harianto David, & Priyo Hari Adi. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X.* (2007). Retrieved January 26, 2012, from Pusat Data Ekonomi dan Bisnis, FE UI.
- Haryanto, Joko Tri, & Ester Sri Astuti. (2009). Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Badan kebijakan Fiskal.* Retrieved January 25, 2012, from [www.perpustakaan.depkeu.go.id](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id)
- Hashimzade, Nigar, & Gareth D. Myles. (2010). Growth And Public Infrastructure. *Macroeconomic Dynamics* 14:2 (2010). 258-274. Retrieved January 26, 2012, from Proquest.
- Indarto, Muhammad. *Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dalam APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.* Tesis program MPKP. Universitas Indonesia. 2011
- Ismail, Abd. Ghafar B., & Muhammad Zilal Hamzah. Fiscal Decentralization and Economic Growth Nexus: Evidence from Province-level Cross-section Data for Indonesia. *Review of Islamic Economics* 10:2 (2006). 133-152. Retrieved January 25, 2012, from [www.perpustakaan.depkeu.go.id](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id).

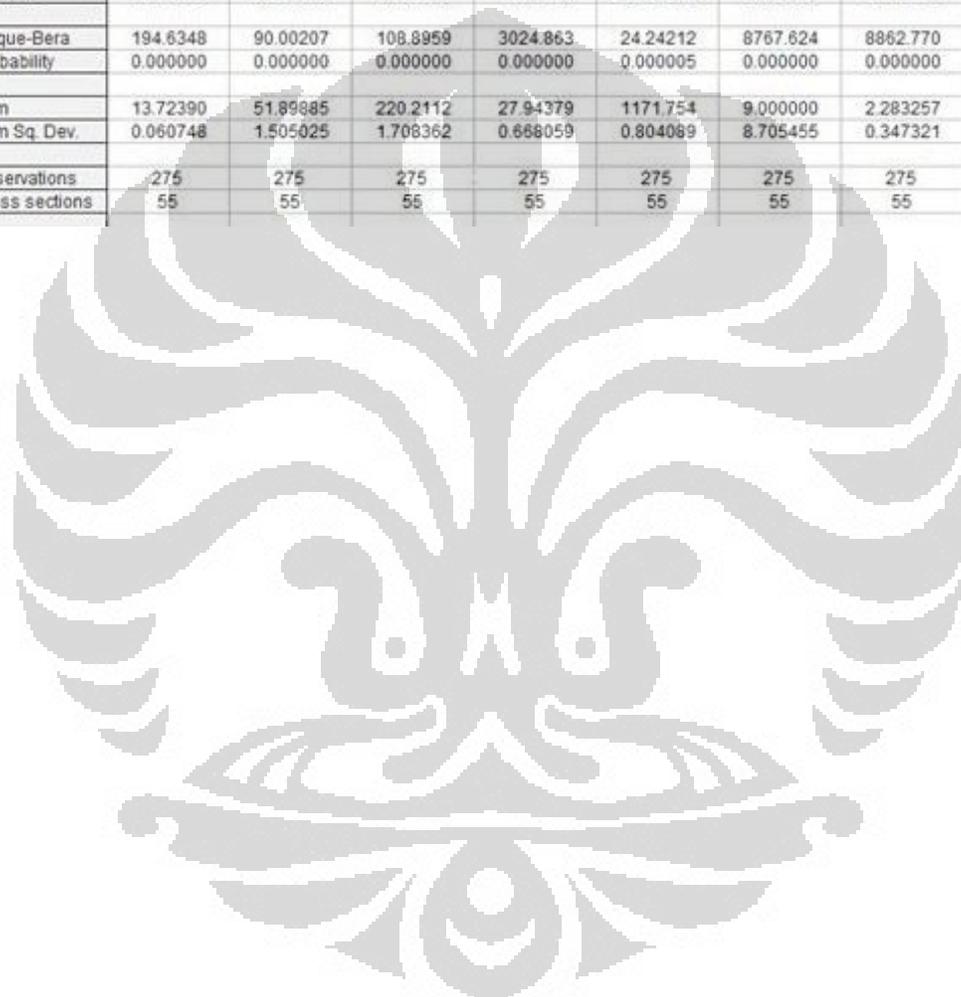
- Landau, Daniel L.. (1985). Government Expenditure and Economic Growth in The Developed Countries: 1952-1976. *Public Choice* 47:3 (1985). 459-477. Retrieved January 26, 2012, from ABI/Inform Global.
- \_\_\_\_\_. (1986). Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Southern Economic Journal* 49:3 (1986). 783-792. Retrieved January 26, 2012, from ABI/Inform Global.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI Yogyakarta. 2002.
- Marino, Bernard D.. *Handbook of Capital Expenditure*. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 1986
- Nordiawan, Deddi, & Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. 2006.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rosadi, Dedi. *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan EViews*. Andi Yogyakarta. 2012
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, 2003.

- Sekaran, Uma, & Roger Bougie. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Fifth Edition*. Wiley. 2010.
- Sianipar, Ronald. *Analisis Pengeluaran Modal Dalam Industri Panel dan Cable Try: Studi Kasus di PT X*. Tesis Program Magister Manajemen. Universitas Indonesia. 2009
- Sidik, Machfud. "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional". *Seminar Nasional "Public Sector Scorecard"*, Jakarta, 17-18 April 2002.
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. ANDI Yogyakarta. 2011.
- Thiessen, Ulrich. Fiscal Decentralisation and Economic Growth in 'Rich' OECD Countries: Is there an Optimum?. Retrieved January 25, 2012, from [www.perpustakaan.depkeu.go.id](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id).
- Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*. Retrieved January 25, 2012, from [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id).
- Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews, Edisi 3*. UPP STIM YKPN. 2011

## Lampiran 1

### Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Define	Pool	Genr	Sheet								
				PDRB?		BM?		DP?		KF?		HDI?		OPINI?		KEPENDUD.		POLITIK?
Mean				0.049905		0.188723		0.800768		0.101614		4.260925		0.032727		0.008303		0.542003
Median				0.051100		0.186223		0.826046		0.089133		4.262398		0.000000		0.006694		0.522727
Maximum				0.109000		0.576034		0.910559		0.408096		4.370586		1.000000		0.151976		0.888889
Minimum				0.004600		0.038454		0.474854		0.042407		4.100327		0.000000		-0.311287		0.272727
Std. Dev.				0.014890		0.074113		0.078961		0.049378		0.054172		0.178246		0.035603		0.128652
Skewness				-0.030351		0.828170		-1.303071		3.230331		-0.660909		5.252560		-2.082837		0.194613
Kurtosis				7.120998		5.260810		4.646716		17.90798		3.607020		28.58939		30.49773		2.554023
Jarque-Bera				194.6348		90.00207		108.8959		3024.863		24.24212		8767.624		8862.770		4.014915
Probability				0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000005		0.000000		0.000000		0.134330
Sum				13.72390		51.89885		220.2112		27.94379		1171.754		9.000000		2.283257		149.0508
Sum Sq. Dev.				0.060748		1.505025		1.708362		0.688059		0.804089		8.705455		0.347321		4.535050
Observations				275		275		275		275		275		275		275		275
Cross sections				55		55		55		55		55		55		55		55



## Lampiran 2

### Hasil Regresi Data Panel dengan Model *Ordinary Least Square*

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/15/12 Time: 09:31				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	-0.024236	0.012290	-1.971961	0.0496
DP?	-0.026982	0.014616	-1.846104	0.0660
KF?	0.047661	0.025302	1.883658	0.0607
LN_HDI?	0.014453	0.003392	4.260252	0.0000
OPINI?	-0.002788	0.005052	-0.551837	0.5815
POP?	0.044146	0.024559	1.797565	0.0734
POL?	0.017247	0.006929	2.489323	0.0134
R-squared	0.135360	Mean dependent var	0.049905	
Adjusted R-squared	0.116003	S.D. dependent var	0.014890	
S.E. of regression	0.014000	Akaike info criterion	-5.674445	
Sum squared resid	0.052525	Schwarz criterion	-5.582382	
Log likelihood	787.2362	Hannan-Quinn criter.	-5.637498	
Durbin-Watson stat	0.367145			

### Lampiran 3

#### Hasil Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PDRB? Method: Pooled Least Squares Date: 06/15/12 Time: 09:32 Sample: 2006 2010 Included observations: 5 Cross-sections included: 55 Total pool (balanced) observations: 275				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.272878	0.246872	-1.105342	0.2703
BM?	-0.006057	0.006589	-0.919333	0.3590
DP?	-0.007477	0.012814	-0.583513	0.5602
KF?	-0.029811	0.025248	-1.180701	0.2390
LN_HDI?	0.078810	0.056224	1.401715	0.1625
OPINI?	-0.000405	0.002766	-0.146288	0.8838
POP?	0.001488	0.011101	0.134060	0.8935
POL?	-0.005274	0.005362	-0.983543	0.3265
Fixed Effects (Cross)				
_BANDUNG--C	0.001194			
_BANJARNEGARA--C	-0.000924			
_BANYUMAS--C	0.002367			
_BATANG--C	-0.012571			
_BLORA--C	-0.002568			
_BOGOR--C	0.006122			
_BONDOWOSO--C	0.014051			
_BOYOLALI--C	-0.007058			
_BREBES--C	0.002455			
_CILACAP--C	-0.010460			
_DEMAK--C	-0.010877			
_GARUT--C	-0.001602			
_GROBOGAN--C	-0.001852			
_JEMBER--C	0.017661			
_JEPARA--C	-0.005008			
_JOMBANG--C	0.007884			
_KARANGANYAR--C	0.001878			
_KEBUMEN--C	-0.005448			
_KENDAL--C	-0.001212			
_KLATEN--C	-0.022433			
_LUMAJANG--C	0.009177			
_MADIUN--C	0.003830			
_MAGELANG--C	-0.002873			
_MALANG--C	0.010887			
_MOJOKERTO--C	0.007450			
_PAMEKASAN--C	0.009906			
_PASURUAN--C	0.014609			
_PATI--C	-0.003337			
_PEKALONGAN--C	-0.004797			
_PEMALANG--C	-0.002145			
_PROBOLINGGO--C	0.019414			
_PURBALINGGA--C	0.006553			
_PURWOREJO--C	0.002007			

_REMBANG--C	-0.004724		
_SRAGEN--C	0.008953		
_SUBANG--C	-0.007343		
_SUKOHARJO--C	-0.005123		
_SUMENEP--C	0.005359		
_TEGAL--C	0.004044		
_TEMANGGUNG--C	-0.015014		
_TULUNGAGUNG--C	0.008010		
_WONOGIRI--C	-0.007797		
_WONOSOBO--C	-0.010994		
_KOTABEKASI--C	0.003538		
_KOTABLITAR--C	0.006548		
_KOTADEPOK--C	0.007320		
_KOTAMAGELANG--C	-0.006608		
_KOTAMALANG--C	0.007574		
_KOTAPEKALONGAN--C	-0.043385		
_KOTAPROBOLINGGO--C	0.006998		
_KOTASALATIGA--C	-0.048831		
_KOTASEMARANG--C	0.052702		
_KORASURABAYA--C	0.014564		
_KOTASURAKARTA--C	-0.031604		
_KOTATANGERANG--C	0.013534		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.882527	Mean dependent var	0.049905
Adjusted R-squared	0.848884	S.D. dependent var	0.014890
S.E. of regression	0.005788	Akaike info criterion	-7.270547
Sum squared resid	0.007136	Schwarz criterion	-6.455129
Log likelihood	1061.700	Hannan-Quinn criter.	-6.943296
F-statistic	26.23241	Durbin-Watson stat	2.420762
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Lampiran 4

### Hasil Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>Dependent Variable: PDRB?</b>				
<b>Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)</b>				
Date: 06/15/12 Time: 09:34				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.125593	0.126550	0.992435	0.3219
BM?	-0.005653	0.006416	-0.880950	0.3791
DP?	-0.028744	0.010039	-2.863109	0.0045
KF?	0.004604	0.020698	0.222423	0.8242
LN_HDI?	-0.012144	0.028688	-0.423322	0.6724
OPINI?	-0.001152	0.002704	-0.425936	0.6705
POP?	0.005752	0.011031	0.521457	0.6025
POL?	-0.000619	0.004955	-0.124940	0.9007
Random Effects (Cross)				
_BANDUNG--C	0.003943			
_BANJARNEGARA--C	-0.000854			
_BANYUMAS--C	0.002430			
_BATANG--C	-0.011705			
_BLORA--C	-0.001017			
_BOGOR--C	0.000720			
_BONDOWOSO--C	0.003241			
_BOYOLALI--C	-0.006852			
_BREBES--C	-0.000870			
_CILACAP--C	-0.009626			
_DEMAK--C	-0.007835			
_GARUT--C	-0.000291			
_GROBOGAN--C	-0.001373			
_JEMBER--C	0.007920			
_JEPARA--C	-0.003451			
_JOMBANG--C	0.007743			
_KARANGANYAR--C	0.004040			
_KEBUMEN--C	-0.003986			
_KENDAL--C	-0.002817			
_KLATEN--C	-0.016059			
_LUMAJANG--C	0.005313			
_MADIUN--C	0.002919			
_MAGELANG--C	-0.000664			
_MALANG--C	0.008782			
_MOJOKERTO--C	0.008614			
_PAMEKASAN--C	0.001850			
_PASURUAN--C	0.008331			
_PATI--C	-0.000905			
_PEKALONGAN--C	-0.004232			
_PEMALANG--C	-0.003635			
_PROBOLINGGO--C	0.007724			
_PURBALINGGA--C	0.006036			

_PURWOREJO--C	0.004952		
_REMBANG--C	-0.003291		
_SRAGEN--C	0.006758		
_SUBANG--C	-0.006099		
_SUKOHARJO--C	-0.000666		
_SUMENEP--C	-0.000734		
_TEGAL--C	0.003290		
_TEMANGGUNG--C	-0.009255		
_TULUNGAGUNG--C	0.009629		
_WONOGIRI--C	-0.006057		
_WONOSOBO--C	-0.010597		
_KOTABEKASI--C	0.003088		
_KOTABLITAR--C	0.012006		
_KOTADEPOK--C	0.012188		
_KOTAMAGELANG--C	-0.000990		
_KOTAMALANG--C	0.010763		
_KOTAPEKALONGAN--C	-0.036430		
_KOTAPROBOLINGGO--C	0.008082		
_KOTASALATIGA--C	-0.042568		
_KOTASEMARANG--C	0.050269		
_KORASURABAYA--C	0.005626		
_KOTASURAKARTA--C	-0.025194		
_KOTATANGERANG--C	0.011797		
Effects Specification			
	S.D.      Rho		
Cross-section random	0.011244      0.7905		
Idiosyncratic random	0.005788      0.2095		
Weighted Statistics			
R-squared	0.049983	Mean dependent var	0.011196
Adjusted R-squared	0.025076	S.D. dependent var	0.006118
S.E. of regression	0.006040	Sum squared resid	0.009742
F-statistic	2.006784	Durbin-Watson stat	1.787066
Prob(F-statistic)	0.054520		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.093383	Mean dependent var	0.049905
Sum squared resid	0.055075	Durbin-Watson stat	0.316098

## Lampiran 5

### Hasil Regresi Data Panel dengan *fixed effect cross sectional weighth*

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Date: 06/15/12 Time: 09:52				
Sample: 2006 2010				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 55				
Total pool (balanced) observations: 275				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.310244	0.112239	-2.764127	0.0062
BM?	-0.005314	0.002892	-1.837689	0.0675
DP?	-0.002735	0.005011	-0.545822	0.5858
KF?	-0.025921	0.010527	-2.462247	0.0146
LN_HDI?	0.086492	0.025724	3.362382	0.0009
OPINI?	0.000448	0.000951	0.471124	0.6380
POP?	-0.002670	0.005974	-0.446857	0.6554
POL?	-0.004713	0.002072	-2.274049	0.0240
Fixed Effects (Cross)				
_BANDUNG--C	0.000953			
_BANJARNEGARA--C	-0.000597			
_BANYUMAS--C	0.002259			
_BATANG--C	-0.012408			
_BLORA--C	-0.002496			
_BOGOR--C	0.006345			
_BONDOWOSO--C	0.015210			
_BOYOLALI--C	-0.007050			
_BREBES--C	0.002790			
_CILACAP--C	-0.010438			
_DEMAK--C	-0.010851			
_GARUT--C	-0.001487			
_GROBOGAN--C	-0.001846			
_JEMBER--C	0.018335			
_JEPARA--C	-0.005228			
_JOMBANG--C	0.007709			
_KARANGANYAR--C	0.001887			
_KEBUMEN--C	-0.005344			
_KENDAL--C	-0.000943			
_KLATEN--C	-0.022710			
_LUMAJANG--C	0.009553			
_MADIUN--C	0.004167			
_MAGELANG--C	-0.002888			
_MALANG--C	0.010829			
_MOJOKERTO--C	0.007331			
_PAMEKASAN--C	0.010684			
_PASURUAN--C	0.015031			
_PATI--C	-0.003473			
_PEKALONGAN--C	-0.004935			
_PEMALANG--C	-0.001888			
_PROBOLINGGO--C	0.020505			
_PURBALINGGA--C	0.006473			

_PURWOREJO--C	0.001854		
_REMBANG--C	-0.004746		
_SRAGEN--C	0.009145		
_SUBANG--C	-0.007316		
_SUKOHARJO--C	-0.005372		
_SUMENEP--C	0.005795		
_TEGAL--C	0.004064		
_TEMANGGUNG--C	-0.015313		
_TULUNGAGUNG--C	0.007650		
_WONOGIRI--C	-0.007737		
_WONOSOBO--C	-0.010967		
_KOTABEKASI--C	0.003562		
_KOTABLITAR--C	0.005901		
_KOTADEPOK--C	0.007257		
_KOTAMAGELANG--C	-0.007287		
_KOTAMALANG--C	0.006999		
_KOTAPEKALONGAN--C	-0.043691		
_KOTAPROBOLINGGO--C	0.007147		
_KOTASALATIGA--C	-0.049457		
_KOTASEMARANG--C	0.052429		
_KORASURABAYA--C	0.013970		
_KOTASURAKARTA--C	-0.032278		
_KOTATANGERANG--C	0.012914		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.992345	Mean dependent var	0.097000
Adjusted R-squared	0.990153	S.D. dependent var	0.080660
S.E. of regression	0.005754	Sum squared resid	0.007053
F-statistic	452.6543	Durbin-Watson stat	2.271506
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.882308	Mean dependent var	0.049905
Sum squared resid	0.007150	Durbin-Watson stat	2.427030

## Lampiran 6

### Perhitungan Uji LM

No	$\sigma_i^2$	$[\sigma_i^2/\sigma^2]-1$	$([\sigma_i^2/\sigma^2]-1)^2$
1	4,31E-05	-0,969811289	0,940533936
2	5,26E-06	-0,996315716	0,992645007
3	1,51E-05	-0,989423445	0,978958753
4	4,78E-05	-0,966519249	0,934159458
5	4,11E-05	-0,971212157	0,943253054
6	7,03E-05	-0,950759481	0,90394359
7	8,06E-06	-0,994354501	0,988740873
8	2,90E-05	-0,97968741	0,959787422
9	6,10E-07	-0,999572735	0,999145653
10	0,00028	-0,803878444	0,646220553
11	1,07E-06	-0,999250535	0,998501633
12	1,72E-05	-0,987952533	0,976050207
13	2,37E-05	-0,983399711	0,967074992
14	3,20E-06	-0,997758611	0,995522245
15	4,32E-06	-0,996974125	0,993957405
16	1,03E-05	-0,992785528	0,985623106
17	5,43E-06	-0,996196643	0,992407751
18	4,61E-05	-0,967709987	0,936462618
19	5,11E-05	-0,964207816	0,929696712
20	9,68E-05	-0,932197976	0,868993067
21	2,02E-06	-0,998585123	0,997172248
22	1,05E-05	-0,992645442	0,985344973
23	9,05E-06	-0,993661071	0,987362324
24	9,04E-06	-0,993668075	0,987376244
25	2,13E-05	-0,985080753	0,97038409
26	9,74E-06	-0,993177772	0,986402086
27	1,13E-05	-0,992085094	0,984232834
28	6,54E-06	-0,995419161	0,990859306
29	5,26E-06	-0,996315716	0,992645007
30	1,45E-05	-0,989843705	0,979790561
31	1,87E-06	-0,998690188	0,997382092
32	1,46E-05	-0,989773662	0,979651901
33	2,28E-05	-0,984030102	0,968315241
34	3,74E-05	-0,973803764	0,94829377
35	2,98E-06	-0,997912706	0,995829769
36	6,79E-05	-0,952440523	0,907142949

No	$\sigma_i^2$	$[\sigma_i^2/\sigma^2]-1$	$([\sigma_i^2/\sigma^2]-1)^2$
37	3,64E-06	-0,99745042	0,99490734
38	1,47E-05	-0,989703618	0,979513252
39	1,37E-05	-0,990404052	0,980900187
40	1,06E-05	-0,992575398	0,985205921
41	3,94E-06	-0,99724029	0,994488195
42	5,41E-05	-0,962106514	0,925648944
43	5,65E-06	-0,996042547	0,992100756
44	8,02E-05	-0,943825183	0,890805976
45	1,52E-06	-0,99893534	0,997871814
46	1,04E-05	-0,992715485	0,985484034
47	0,000137	-0,904040524	0,81728927
48	2,79E-06	-0,998045789	0,996095397
49	7,36E-07	-0,99948448	0,998969227
50	1,03E-05	-0,992785528	0,985623106
51	1,22E-06	-0,99914547	0,998291671
52	1,35E-06	-0,999054414	0,998109722
53	7,58E-06	-0,994690709	0,989409607
54	1,31E-06	-0,999082431	0,998165705
55	2,06E-05	-0,985571057	0,971350308
	0,001428	-54,000000	53,070094

T =	5
T/2 =	2,5
LM =	132,68
X <sup>2</sup> - table =	72,15321612

**Lampiran 7**  
**Rincian Data**

No	DAERAH	TAHUN	PDRB	BM	DP	KF	LnHDI	OPINI	POP	POL
1	Kab. Bandung	2006	0,0585	0,1164	0,8093	0,0963	4,2852	0	-0,3113	0,5111
2	Kab. Bogor	2006	0,0595	0,2476	0,7330	0,1747	4,2446	0	0,1392	0,6222
3	Kab. Garut	2006	0,0411	0,1345	0,8826	0,0616	4,2408	0	0,0160	0,5116
4	Kab. Subang	2006	0,0245	0,1886	0,8605	0,0828	4,2465	0	0,0073	0,7556
5	Kota Bekasi	2006	0,0607	0,3376	0,8109	0,1652	4,3151	0	0,0658	0,6444
6	Kota Depok	2006	0,0665	0,2545	0,7143	0,1249	4,3525	0	0,0334	0,4667
7	Kab. Banjarnegara	2006	0,0435	0,2160	0,8742	0,0866	4,2232	0	0,0067	0,2727
8	Kab. Banyumas	2006	0,0448	0,1707	0,8436	0,1187	4,2600	0	0,0088	0,4091
9	Kab. Batang	2006	0,0251	0,1579	0,8710	0,0767	4,2254	0	0,0063	0,3556
10	Kab. Blora	2006	0,0415	0,1303	0,8901	0,0814	4,2257	0	0,0022	0,3333
11	Kab. Boyolali	2006	0,0420	0,1396	0,8634	0,1119	4,2395	0	0,0032	0,4222
12	Kab. Brebes	2006	0,0471	0,1973	0,8731	0,0800	4,1880	0	0,0050	0,4889
13	Kab. Cilacap	2006	0,0511	0,2738	0,8108	0,0955	4,2453	0	0,0037	0,3778
14	Kab. Demak	2006	0,0402	0,0742	0,8837	0,0688	4,2533	0	0,0064	0,4667
15	Kab. Grobogan	2006	0,0400	0,1386	0,8866	0,0720	4,2373	0	0,0074	0,4318
16	Kab. Jepara	2006	0,0419	0,2243	0,8294	0,1003	4,2478	0	-0,0185	0,5333
17	Kab. Karanganyar	2006	0,0508	0,1609	0,8628	0,0912	4,2639	0	0,0077	0,3778
18	Kab. Kebumen	2006	0,0408	0,1624	0,8352	0,1496	4,2413	0	0,0079	0,3556
19	Kab. Kendal	2006	0,0367	0,3174	0,8148	0,1145	4,2239	0	0,0144	0,4222
20	Kab. Klaten	2006	0,0230	0,1147	0,9106	0,0465	4,2742	0	0,0056	0,5111
21	Kab. Magelang	2006	0,0491	0,2529	0,8516	0,1000	4,2577	0	0,0097	0,3333
22	Kab. Pati	2006	0,0445	0,1356	0,8363	0,1148	4,2736	0	0,0145	0,4000
23	Kab. Pekalongan	2006	0,0421	0,1138	0,8983	0,0689	4,2393	0	0,0421	0,6222
24	Kab. Pemasang	2006	0,0372	0,1987	0,8661	0,0992	4,2101	0	0,0085	0,4000
25	Kab. Purbalingga	2006	0,0506	0,1876	0,8513	0,0997	4,2466	0	0,0058	0,4889
26	Kab. Purworejo	2006	0,0523	0,1134	0,8987	0,0691	4,2516	0	0,0028	0,3556
27	Kab. Rembang	2006	0,0553	0,1386	0,8594	0,0972	4,2442	0	0,0059	0,5111
28	Kab. Sragen	2006	0,0518	0,1918	0,8550	0,0878	4,2160	0	0,0066	0,5778
29	Kab. Sukoharjo	2006	0,0453	0,1554	0,8663	0,0904	4,2728	0	0,0062	0,4000
30	Kab. Tegal	2006	0,0519	0,2471	0,8646	0,0890	4,2170	0	0,0038	0,5778
31	Kab. Temanggung	2006	0,0331	0,1822	0,8851	0,0747	4,2869	0	0,0144	0,4000
32	Kab. Wonogiri	2006	0,0407	0,2557	0,8886	0,0792	4,2469	0	0,0058	0,5111
33	Kab. Wonosobo	2006	0,0323	0,2598	0,8782	0,0706	4,2305	0	0,0050	0,5556
34	Kota Magelang	2006	0,0244	0,2060	0,8261	0,1524	4,3240	0	0,0077	0,4800
35	Kota Pekalongan	2006	0,0106	0,2201	0,8672	0,0786	4,2841	0	0,0033	0,3000
36	Kota Salatiga	2006	0,0048	0,2412	0,8321	0,1438	4,3183	0	0,0040	0,6000
37	Kota Semarang	2006	0,1039	0,0975	0,7544	0,2425	4,3299	0	0,0102	0,4889
38	Kota Surakarta	2006	0,0242	0,1358	0,7614	0,1671	4,3355	0	-0,0405	0,3000
39	Kab. Bondowoso	2006	0,0558	0,1024	0,8982	0,0574	4,1003	0	0,0042	0,4545
40	Kab. Jember	2006	0,0570	0,1792	0,8826	0,0718	4,1438	0	0,0024	0,5909
41	Kab. Jombang	2006	0,0573	0,2000	0,8388	0,1209	4,2526	0	-0,0020	0,5556
42	Kab. Lumajang	2006	0,0522	0,2449	0,8583	0,0882	4,1881	0	0,0046	0,4222
43	Kab. Madiun	2006	0,0460	0,1809	0,8962	0,0545	4,2158	0	0,0078	0,5556
44	Kab. Malang	2006	0,0574	0,1558	0,8658	0,0767	4,2252	0	-0,0061	0,7778
45	Kab. Mojokerto	2006	0,0547	0,1323	0,8518	0,0942	4,2572	0	0,0033	0,7556
46	Kab. Pamekasan	2006	0,0452	0,2333	0,8892	0,0778	4,1268	0	0,0207	0,5556
47	Kab. Pasuruan	2006	0,0594	0,1576	0,8301	0,0988	4,1788	0	0,0053	0,6000
48	Kab. Probolinggo	2006	0,0569	0,1754	0,9002	0,0636	4,1048	0	0,0128	0,5111
49	Kab. Sumenep	2006	0,0449	0,1155	0,9046	0,0724	4,1444	0	0,0122	0,6444
50	Kab. Tulungagung	2006	0,0548	0,1170	0,8826	0,0597	4,2584	0	0,0059	0,8444
51	Kota Blitar	2006	0,0589	0,2589	0,8457	0,0845	4,3252	0	0,0057	0,5600

No	DAERAH	TAHUN	PDRB	BM	DP	KF	LnHDI	OPINI	POP	POL
52	Kota Malang	2006	0,0614	0,1753	0,7947	0,1231	4,3220	0	0,0060	0,6667
53	Kota Probolinggo	2006	0,0592	0,1427	0,8111	0,1039	4,2698	0	0,0030	0,4333
54	Kota Surabaya	2006	0,0635	0,1038	0,5231	0,3883	4,3190	1	0,0159	0,6667
55	Kota Tangerang	2006	0,0685	0,4298	0,6516	0,1652	4,3056	0	0,0181	0,5556
56	Kab. Bandung	2007	0,0592	0,2146	0,8207	0,0854	4,2900	0	0,0320	0,5111
57	Kab. Bogor	2007	0,0605	0,2429	0,7279	0,1890	4,2496	0	0,0086	0,8889
58	Kab. Garut	2007	0,0476	0,1928	0,8840	0,0678	4,2484	0	0,0153	0,5116
59	Kab. Subang	2007	0,0485	0,2166	0,8327	0,0622	4,2489	0	0,0142	0,7556
60	Kota Bekasi	2007	0,0644	0,2996	0,6337	0,1663	4,3216	0	0,0131	0,6444
61	Kota Depok	2007	0,0704	0,2364	0,6713	0,1201	4,3553	0	0,0349	0,4667
62	Kab. Banjarnegara	2007	0,0501	0,2322	0,8477	0,0809	4,2274	0	0,0083	0,2727
63	Kab. Banyumas	2007	0,0530	0,1625	0,8230	0,1110	4,2659	0	-0,0275	0,4889
64	Kab. Batang	2007	0,0349	0,2267	0,8699	0,0647	4,2289	0	0,0067	0,3556
65	Kab. Blora	2007	0,0377	0,2085	0,8892	0,0774	4,2357	0	0,0022	0,3333
66	Kab. Boyolali	2007	0,0408	0,2245	0,8504	0,0957	4,2432	0	0,0030	0,4222
67	Kab. Brebes	2007	0,0479	0,2392	0,8612	0,0796	4,1983	0	0,0039	0,4889
68	Kab. Cilacap	2007	0,0264	0,3182	0,8518	0,0808	4,2521	0	0,0046	0,3778
69	Kab. Demak	2007	0,0415	0,2721	0,8480	0,0583	4,2634	0	0,0288	0,4667
70	Kab. Grobogan	2007	0,0437	0,2233	0,8411	0,0744	4,2449	0	0,0062	0,4318
71	Kab. Jepara	2007	0,0474	0,2679	0,7986	0,0997	4,2690	0	0,0147	0,5333
72	Kab. Karanganyar	2007	0,0574	0,1846	0,8374	0,0977	4,2710	0	0,0080	0,3778
73	Kab. Kebumen	2007	0,0452	0,2880	0,8573	0,0652	4,2479	0	0,0078	0,3556
74	Kab. Kendal	2007	0,0431	0,1992	0,8213	0,1273	4,2328	0	0,0206	0,4222
75	Kab. Klaten	2007	0,0331	0,1602	0,8917	0,0491	4,2833	0	0,0029	0,5111
76	Kab. Magelang	2007	0,0521	0,1745	0,8298	0,0954	4,2631	0	0,0075	0,3556
77	Kab. Pati	2007	0,0519	0,2215	0,8335	0,0963	4,2749	0	0,0038	0,4000
78	Kab. Pekalongan	2007	0,0459	0,1721	0,8730	0,0816	4,2441	0	0,0590	0,6222
79	Kab. Pemasang	2007	0,0447	0,2283	0,8439	0,0862	4,2179	0	0,0140	0,4000
80	Kab. Purbalingga	2007	0,0619	0,2308	0,8322	0,1011	4,2539	0	0,0065	0,4889
81	Kab. Purworejo	2007	0,0608	0,2051	0,8593	0,0768	4,2582	0	0,0027	0,3556
82	Kab. Rembang	2007	0,0381	0,3059	0,8569	0,0784	4,2562	0	0,0052	0,5111
83	Kab. Sragen	2007	0,0573	0,2567	0,7961	0,0960	4,2338	0	0,0042	0,5778
84	Kab. Sukoharjo	2007	0,0511	0,2138	0,8701	0,0737	4,2830	0	0,0064	0,4000
85	Kab. Tegal	2007	0,0559	0,2271	0,8411	0,0901	4,2316	0	0,0110	0,5778
86	Kab. Temanggung	2007	0,0403	0,2205	0,8701	0,0755	4,2916	0	0,0085	0,4000
87	Kab. Wonogiri	2007	0,0507	0,1559	0,8839	0,0851	4,2501	0	0,0472	0,5111
88	Kab. Wonosobo	2007	0,0358	0,2684	0,8572	0,0714	4,2373	0	0,0061	0,6000
89	Kota Magelang	2007	0,0517	0,2352	0,8492	0,1130	4,3266	0	0,0199	0,4800
90	Kota Pekalongan	2007	0,0106	0,2482	0,8682	0,0818	4,2918	0	0,0131	0,3000
91	Kota Salatiga	2007	0,0048	0,2186	0,8368	0,1427	4,3224	0	-0,0494	0,6000
92	Kota Semarang	2007	0,1076	0,1428	0,6571	0,2133	4,3322	0	0,0143	0,4889
93	Kota Surakarta	2007	0,0244	0,2163	0,7503	0,1520	4,3383	0	0,0048	0,3000
94	Kab. Bondowoso	2007	0,0551	0,1785	0,8863	0,0605	4,1069	0	0,0204	0,4545
95	Kab. Jember	2007	0,0598	0,2200	0,8850	0,0746	4,1474	0	0,0034	0,5909
96	Kab. Jombang	2007	0,0607	0,1554	0,8424	0,1267	4,2689	0	0,0091	0,5556
97	Kab. Lumajang	2007	0,0550	0,2467	0,8642	0,0852	4,1927	0	0,0038	0,4222
98	Kab. Madiun	2007	0,0529	0,2154	0,8839	0,0523	4,2230	0	0,0039	0,5556
99	Kab. Malang	2007	0,0609	0,3350	0,8694	0,0753	4,2351	0	0,0093	0,7778
100	Kab. Mojokerto	2007	0,0593	0,2043	0,8403	0,0864	4,2765	0	0,0115	0,7556
101	Kab. Pamekasan	2007	0,0476	0,2348	0,8739	0,0615	4,1350	0	0,0205	0,5556
102	Kab. Pasuruan	2007	0,0617	0,1469	0,8466	0,0989	4,1824	0	0,0076	0,6000
103	Kab. Probolinggo	2007	0,0597	0,2496	0,8880	0,0584	4,1104	0	-0,0260	0,5111
104	Kab. Sumenep	2007	0,0497	0,1998	0,9054	0,0633	4,1543	0	0,0034	0,6444
105	Kab. Tulungagung	2007	0,0575	0,1692	0,8708	0,0692	4,2767	0	0,0174	0,8444

No	DAERAH	TAHUN	PDRB	BM	DP	KF	LnHDI	OPINI	POP	POL
106	Kota Blitar	2007	0,0619	0,2825	0,8439	0,0894	4,3292	0	0,0242	0,5600
107	Kota Malang	2007	0,0620	0,2446	0,7869	0,1424	4,3270	0	0,0058	0,6667
108	Kota Probolinggo	2007	0,0639	0,3141	0,7515	0,0941	4,2872	0	0,1520	0,4333
109	Kota Surabaya	2007	0,0631	0,1598	0,5785	0,3907	4,3290	0	0,0163	0,6667
110	Kota Tangerang	2007	0,0686	0,3255	0,6650	0,1906	4,3095	1	0,0181	0,6667
111	Kab. Bandung	2008	0,0530	0,1219	0,7720	0,0977	4,2961	0	0,0293	0,5111
112	Kab. Bogor	2008	0,0558	0,2081	0,7158	0,1749	4,2579	0	0,0209	0,6222
113	Kab. Garut	2008	0,0469	0,2201	0,8626	0,0734	4,2559	0	0,0153	0,5116
114	Kab. Subang	2008	0,0433	0,1892	0,8461	0,0610	4,2546	0	0,0175	0,7556
115	Kota Bekasi	2008	0,0594	0,2430	0,6324	0,1510	4,3272	0	0,0297	0,6444
116	Kota Depok	2008	0,0642	0,2650	0,6704	0,1278	4,3613	0	0,0229	0,4667
117	Kab. Banjarnegara	2008	0,0498	0,2393	0,8531	0,0805	4,2340	0	0,0078	0,2727
118	Kab. Banyumas	2008	0,0538	0,1584	0,7953	0,1103	4,2735	0	0,0049	0,6222
119	Kab. Batang	2008	0,0367	0,2593	0,8479	0,0897	4,2374	0	0,0070	0,3556
120	Kab. Blora	2008	0,0580	0,1843	0,8665	0,0638	4,2432	0	0,0081	0,3333
121	Kab. Boyolali	2008	0,0404	0,1862	0,8581	0,0953	4,2484	0	0,0027	0,4222
122	Kab. Brebes	2008	0,0481	0,2005	0,8408	0,0741	4,2059	0	0,0024	0,4889
123	Kab. Cilacap	2008	0,0607	0,3099	0,8113	0,1148	4,2614	0	0,0047	0,3778
124	Kab. Demak	2008	0,0411	0,1947	0,8371	0,0757	4,2705	0	0,0035	0,4667
125	Kab. Grobogan	2008	0,0533	0,2662	0,8474	0,0872	4,2516	0	0,0054	0,4318
126	Kab. Jepara	2008	0,0449	0,2102	0,8149	0,0958	4,2758	0	0,0160	0,5333
127	Kab. Karanganyar	2008	0,0530	0,1939	0,7758	0,0834	4,2796	0	0,0167	0,3778
128	Kab. Kebumen	2008	0,0580	0,1863	0,8401	0,0682	4,2512	0	0,0078	0,3556
129	Kab. Kendal	2008	0,0426	0,1542	0,8159	0,0948	4,2399	0	0,0149	0,4222
130	Kab. Klaten	2008	0,0393	0,1689	0,8717	0,0579	4,2895	0	0,0027	0,5111
131	Kab. Magelang	2008	0,0499	0,1427	0,8131	0,0915	4,2687	0	0,0136	0,3556
132	Kab. Pati	2008	0,0494	0,1804	0,8062	0,0894	4,2803	0	0,0067	0,4000
133	Kab. Pekalongan	2008	0,0478	0,1435	0,8355	0,0821	4,2529	0	0,0251	0,6222
134	Kab. Pemasang	2008	0,0499	0,2137	0,8337	0,1056	4,2251	0	0,0114	0,4000
135	Kab. Purbalingga	2008	0,0530	0,3420	0,7993	0,1210	4,2611	0	0,0062	0,4889
136	Kab. Purworejo	2008	0,0562	0,1541	0,8578	0,0740	4,2668	0	0,0024	0,3556
137	Kab. Rembang	2008	0,0467	0,2080	0,8387	0,0863	4,2644	0	0,0057	0,5111
138	Kab. Sragen	2008	0,0569	0,2684	0,7937	0,1035	4,2423	0	0,0050	0,5778
139	Kab. Sukoharjo	2008	0,0484	0,1570	0,8555	0,0584	4,2906	0	0,0068	0,4000
140	Kab. Tegal	2008	0,0532	0,2199	0,8406	0,0678	4,2419	0	0,0023	0,5778
141	Kab. Temanggung	2008	0,0354	0,2420	0,8629	0,0770	4,2963	0	0,0098	0,4000
142	Kab. Wonogiri	2008	0,0427	0,2056	0,8389	0,0771	4,2552	0	0,0267	0,5111
143	Kab. Wonosobo	2008	0,0369	0,3444	0,8528	0,0817	4,2420	0	0,0071	0,6000
144	Kota Magelang	2008	0,0505	0,2310	0,8372	0,1291	4,3319	0	0,0299	0,4800
145	Kota Pekalongan	2008	0,0097	0,2622	0,8385	0,0758	4,2971	0	0,0071	0,3000
146	Kota Salatiga	2008	0,0047	0,3433	0,7092	0,1226	4,3282	0	0,0054	0,6000
147	Kota Semarang	2008	0,1058	0,1170	0,6623	0,2022	4,3378	0	0,0186	0,4889
148	Kota Surakarta	2008	0,0239	0,2153	0,6834	0,1355	4,3459	0	0,0147	0,3000
149	Kab. Bondowoso	2008	0,0531	0,1728	0,8915	0,0690	4,1151	0	0,0203	0,5778
150	Kab. Jember	2008	0,0604	0,2171	0,8364	0,1079	4,1543	0	0,0000	0,6591
151	Kab. Jombang	2008	0,0579	0,2068	0,8321	0,1409	4,2746	0	0,1442	0,5556
152	Kab. Lumajang	2008	0,0543	0,1983	0,8779	0,0756	4,1980	0	0,0035	0,4222
153	Kab. Madiun	2008	0,0527	0,2192	0,8969	0,0489	4,2287	0	0,1161	0,5556
154	Kab. Malang	2008	0,0575	0,2480	0,8677	0,0750	4,2420	0	0,0051	0,7778
155	Kab. Mojokerto	2008	0,0588	0,2508	0,8489	0,0683	4,2837	0	0,0626	0,7556
156	Kab. Pamekasan	2008	0,0553	0,2068	0,8914	0,0570	4,1452	0	0,0202	0,5556
157	Kab. Pasuruan	2008	0,0589	0,2383	0,8408	0,1184	4,1900	0	0,0033	0,6000
158	Kab. Probolinggo	2008	0,0578	0,3239	0,7786	0,1201	4,1181	0	0,0013	0,5111
159	Kab. Sumenep	2008	0,0430	0,2545	0,9056	0,0685	4,1626	0	0,0044	0,6444

No	DAERAH	TAHUN	PDRB	BM	DP	KF	LnHDI	OPINI	POP	POL
160	Kab. Tulungagung	2008	0,0586	0,1434	0,8672	0,0706	4,2829	0	0,0047	0,8444
161	Kota Blitar	2008	0,0629	0,2950	0,7911	0,1146	4,3386	0	0,0091	0,5600
162	Kota Malang	2008	0,0593	0,2218	0,7999	0,1213	4,3332	0	0,0055	0,6667
163	Kota Probolinggo	2008	0,0602	0,3239	0,7786	0,1201	4,2944	0	0,0078	0,4333
164	Kota Surabaya	2008	0,0623	0,2350	0,5562	0,3607	4,3355	0	0,0258	0,6667
165	Kota Tangerang	2008	0,0637	0,2587	0,6533	0,1825	4,3135	1	0,0154	0,6818
166	Kab. Bandung	2009	0,0434	0,0853	0,7386	0,0878	4,3019	0	0,0147	0,6200
167	Kab. Bogor	2009	0,0414	0,2369	0,6998	0,1569	4,2676	0	0,0315	0,6600
168	Kab. Garut	2009	0,0557	0,0533	0,7802	0,0726	4,2624	0	0,0153	0,5800
169	Kab. Subang	2009	0,0462	0,1570	0,8174	0,0630	4,2607	0	0,0162	0,4600
170	Kota Bekasi	2009	0,0413	0,2281	0,5786	0,1543	4,3320	0	0,0227	0,6444
171	Kota Depok	2009	0,0622	0,2503	0,6612	0,1211	4,3665	0	0,0221	0,4667
172	Kab. Banjarnegara	2009	0,0511	0,1053	0,8271	0,0825	4,2432	0	0,0088	0,3200
173	Kab. Banyumas	2009	0,0549	0,1567	0,7909	0,1303	4,2804	0	0,0046	0,6327
174	Kab. Batang	2009	0,0372	0,1832	0,8450	0,0841	4,2462	0	0,0047	0,4889
175	Kab. Blora	2009	0,0497	0,0869	0,8610	0,0618	4,2505	0	0,0067	0,5000
176	Kab. Boyolali	2009	0,0516	0,1200	0,8331	0,0970	4,2548	0	0,0022	0,6222
177	Kab. Brebes	2009	0,0499	0,1411	0,8350	0,0866	4,2149	0	0,0027	0,6444
178	Kab. Cilacap	2009	0,0153	0,1781	0,7949	0,1218	4,2682	0	0,0032	0,4600
179	Kab. Demak	2009	0,0408	0,2049	0,8217	0,0672	4,2781	0	0,0084	0,5200
180	Kab. Grobogan	2009	0,0503	0,1236	0,8250	0,0977	4,2570	0	0,0074	0,7200
181	Kab. Jepara	2009	0,0502	0,1197	0,8135	0,0949	4,2829	0	0,0157	0,5000
182	Kab. Karanganyar	2009	0,0554	0,0781	0,8233	0,0854	4,2843	0	0,0084	0,6000
183	Kab. Kebumen	2009	0,0394	0,1686	0,8527	0,0667	4,2589	0	0,0076	0,4600
184	Kab. Kendal	2009	0,0555	0,1641	0,8117	0,1137	4,2495	0	0,0139	0,4200
185	Kab. Klaten	2009	0,0424	0,0750	0,8526	0,0582	4,2961	0	0,0026	0,6400
186	Kab. Magelang	2009	0,0472	0,1271	0,8276	0,0889	4,2733	0	0,0105	0,4800
187	Kab. Pati	2009	0,0469	0,1684	0,8098	0,0948	4,2866	0	0,0072	0,5400
188	Kab. Pekalongan	2009	0,0430	0,1744	0,8425	0,0996	4,2603	0	0,0084	0,7111
189	Kab. Pemasang	2009	0,0478	0,1499	0,8272	0,0969	4,2344	0	0,0056	0,4600
190	Kab. Purbalingga	2009	0,0589	0,1819	0,7534	0,1320	4,2698	0	0,0057	0,5556
191	Kab. Purworejo	2009	0,0496	0,1451	0,8440	0,0802	4,2750	0	0,0029	0,4667
192	Kab. Rembang	2009	0,0446	0,0969	0,8250	0,0968	4,2704	0	0,0055	0,4444
193	Kab. Sragen	2009	0,0601	0,1267	0,7976	0,0901	4,2523	0	0,0063	0,6222
194	Kab. Sukoharjo	2009	0,0476	0,0771	0,8614	0,0688	4,2944	0	0,0070	0,7111
195	Kab. Tegal	2009	0,0529	0,1678	0,8324	0,0837	4,2496	0	-0,0503	0,5306
196	Kab. Temanggung	2009	0,0409	0,1858	0,8268	0,0925	4,3020	0	0,0081	0,5227
197	Kab. Wonogiri	2009	0,0473	0,0960	0,8468	0,0648	4,2632	0	0,0183	0,5333
198	Kab. Wonosobo	2009	0,0402	0,2831	0,8018	0,0669	4,2496	0	0,0072	0,5556
199	Kota Magelang	2009	0,0511	0,2925	0,8081	0,1494	4,3356	0	0,0078	0,5200
200	Kota Pekalongan	2009	0,0097	0,2558	0,8339	0,1054	4,3042	0	0,0082	0,5333
201	Kota Salatiga	2009	0,0046	0,3478	0,7804	0,1226	4,3322	0	0,0062	0,6800
202	Kota Semarang	2009	0,1074	0,1441	0,6543	0,2033	4,3425	0	0,0171	0,6667
203	Kota Surakarta	2009	0,0248	0,1231	0,7522	0,1533	4,3501	0	0,0101	0,7400
204	Kab. Bondowoso	2009	0,0501	0,1887	0,7893	0,0676	4,1289	0	0,0034	0,4222
205	Kab. Jember	2009	0,0555	0,2043	0,8177	0,1216	4,1640	0	0,0120	0,7755
206	Kab. Jombang	2009	0,0528	0,1521	0,8078	0,0976	4,2812	0	0,0036	0,6800
207	Kab. Lumajang	2009	0,0546	0,1109	0,8404	0,0849	4,2086	0	0,0032	0,5000
208	Kab. Madiun	2009	0,0508	0,1952	0,7890	0,0424	4,2382	0	0,0011	0,7111
209	Kab. Malang	2009	0,0525	0,2559	0,8141	0,1389	4,2498	0	0,0048	0,6600
210	Kab. Mojokerto	2009	0,0518	0,1680	0,8120	0,0717	4,2895	0	0,0636	0,8000
211	Kab. Pamekasan	2009	0,0518	0,2050	0,8480	0,0590	4,1559	0	0,0199	0,4889
212	Kab. Pasuruan	2009	0,0531	0,2415	0,8150	0,1113	4,2023	0	0,0026	0,5200
213	Kab. Probolinggo	2009	0,0572	0,2286	0,8290	0,0590	4,1292	0	0,1487	0,6600

No	DAERAH	TAHUN	PDRB	BM	DP	KF	LnHDI	OPINI	POP	POL
214	Kab. Sumenep	2009	0,0444	0,2044	0,8895	0,0611	4,1716	0	0,0009	0,6200
215	Kab. Tulungagung	2009	0,0601	0,1347	0,7661	0,0851	4,2895	0	0,0057	0,6800
216	Kota Blitar	2009	0,0621	0,2878	0,7395	0,1029	4,3435	0	0,0462	0,6800
217	Kota Malang	2009	0,0621	0,3893	0,7498	0,1588	4,3398	0	0,0052	0,7556
218	Kota Probolinggo	2009	0,0535	0,4144	0,6996	0,1246	4,3004	0	0,0031	0,5000
219	Kota Surabaya	2009	0,0553	0,5760	0,5413	0,4081	4,3415	0	0,0123	0,8200
220	Kota Tangerang	2009	0,0574	0,2332	0,6707	0,1754	4,3160	1	0,0789	0,6600
221	Kab. Bandung	2010	0,0588	0,0955	0,7029	0,0958	4,3047	0	0,0018	0,6200
222	Kab. Bogor	2010	0,0509	0,2352	0,6419	0,1534	4,2789	0	-0,0294	0,6600
223	Kab. Garut	2010	0,0534	0,0919	0,7570	0,0645	4,2677	0	0,0110	0,5800
224	Kab. Subang	2010	0,0501	0,1196	0,8129	0,0609	4,2646	0	0,0049	0,4600
225	Kota Bekasi	2010	0,0584	0,1728	0,5790	0,1858	4,3355	0	0,0734	0,7778
226	Kota Depok	2010	0,0636	0,2018	0,6332	0,1308	4,3706	0	0,1299	0,6400
227	Kab. Banjarnegara	2010	0,0489	0,1796	0,7238	0,0723	4,2472	0	0,0076	0,3200
228	Kab. Banyumas	2010	0,0577	0,0875	0,7180	0,1399	4,2850	0	0,0294	0,6327
229	Kab. Batang	2010	0,0497	0,0447	0,7815	0,0797	4,2543	0	0,0044	0,4889
230	Kab. Blora	2010	0,0504	0,0669	0,8116	0,0591	4,2572	0	-0,0339	0,5000
231	Kab. Boyolali	2010	0,0360	0,1101	0,7516	0,0951	4,2587	0	0,0022	0,6222
232	Kab. Brebes	2010	0,0494	0,1195	0,7860	0,0646	4,2224	0	-0,0090	0,6444
233	Kab. Cilacap	2010	0,0443	0,1325	0,7403	0,1210	4,2729	0	0,0026	0,4800
234	Kab. Demak	2010	0,0412	0,1538	0,7060	0,0688	4,2847	0	-0,0205	0,5200
235	Kab. Grobogan	2010	0,0505	0,1017	0,7903	0,0869	4,2603	0	0,0061	0,7200
236	Kab. Jepara	2010	0,0452	0,1405	0,7424	0,0994	4,2855	1	-0,0097	0,5000
237	Kab. Karanganyar	2010	0,0542	0,1200	0,7144	0,0907	4,2931	0	0,0062	0,6000
238	Kab. Kebumen	2010	0,0415	0,1177	0,7718	0,0582	4,2644	0	0,0065	0,4600
239	Kab. Kendal	2010	0,0595	0,1479	0,7135	0,0950	4,2543	0	0,0052	0,4200
240	Kab. Klaten	2010	0,0173	0,0385	0,7980	0,0526	4,3018	0	0,0028	0,6400
241	Kab. Magelang	2010	0,0451	0,1007	0,7939	0,0782	4,2778	0	-0,0294	0,4800
242	Kab. Pati	2010	0,0511	0,0691	0,7445	0,1137	4,2899	0	-0,0587	0,5400
243	Kab. Pekalongan	2010	0,0427	0,1011	0,7897	0,0932	4,2683	0	-0,1389	0,7111
244	Kab. Pemasang	2010	0,0494	0,0833	0,7805	0,0825	4,2469	0	0,0044	0,4600
245	Kab. Purbalingga	2010	0,0567	0,0629	0,7655	0,1162	4,2776	0	-0,0548	0,5556
246	Kab. Purworejo	2010	0,0501	0,0761	0,7832	0,0853	4,2843	0	-0,1115	0,4667
247	Kab. Rembang	2010	0,0445	0,1350	0,7381	0,0963	4,2776	0	0,0060	0,4444
248	Kab. Sragen	2010	0,0606	0,0957	0,7395	0,0882	4,2627	0	0,0069	0,6222
249	Kab. Sukoharjo	2010	0,0465	0,0796	0,7775	0,0826	4,2982	0	0,0046	0,7111
250	Kab. Tegal	2010	0,0483	0,1366	0,7915	0,0761	4,2569	0	-0,0182	0,5306
251	Kab. Temanggung	2010	0,0431	0,0677	0,7729	0,0834	4,3056	0	0,0116	0,5227
252	Kab. Wonogiri	2010	0,0314	0,1072	0,7480	0,0674	4,2673	0	0,0089	0,5333
253	Kab. Wonosobo	2010	0,0429	0,0581	0,7639	0,0772	4,2559	0	-0,0402	0,5556
254	Kota Magelang	2010	0,0612	0,1161	0,7424	0,1450	4,3386	0	0,0067	0,5200
255	Kota Pekalongan	2010	0,0096	0,1384	0,7612	0,1163	4,3104	0	0,0191	0,5333
256	Kota Salatiga	2010	0,0046	0,2141	0,6945	0,1231	4,3377	0	0,0077	0,6800
257	Kota Semarang	2010	0,1090	0,1249	0,5957	0,1893	4,3452	0	0,0136	0,6667
258	Kota Surakarta	2010	0,0250	0,0966	0,7114	0,1380	4,3549	1	-0,0546	0,7400
259	Kab. Bondowoso	2010	0,0564	0,1479	0,7169	0,0649	4,1422	0	0,0006	0,5227
260	Kab. Jember	2010	0,0605	0,0997	0,7341	0,1004	4,1736	0	0,0689	0,7800
261	Kab. Jombang	2010	0,0612	0,0823	0,7159	0,1141	4,2863	0	-0,1081	0,6800
262	Kab. Lumajang	2010	0,0592	0,0897	0,7701	0,0916	4,2169	0	-0,0210	0,5000
263	Kab. Madiun	2010	0,0592	0,1281	0,6916	0,0585	4,2511	0	0,0010	0,7111
264	Kab. Malang	2010	0,0627	0,1635	0,7232	0,0789	4,2562	0	0,0090	0,6600
265	Kab. Mojokerto	2010	0,0674	0,0836	0,7177	0,0795	4,2958	0	0,0169	0,8000
266	Kab. Pamekasan	2010	0,0575	0,1344	0,7674	0,0654	4,1682	0	-0,0655	0,4889
267	Kab. Pasuruan	2010	0,0614	0,1143	0,7896	0,0891	4,2138	0	0,0251	0,5200

No	DAERAH	TAHUN	PDRB	BM	DP	KF	LnHDI	OPINI	POP	POL
268	Kab. Probolinggo	2010	0,0619	0,1161	0,7472	0,0534	4,1430	0	-0,0476	0,6600
269	Kab. Sumenep	2010	0,0564	0,0983	0,8260	0,0493	4,1836	0	-0,0343	0,6200
270	Kab. Tulungagung	2010	0,0648	0,1152	0,7001	0,0859	4,2951	1	0,0062	0,6800
271	Kota Blitar	2010	0,0632	0,2195	0,6431	0,1141	4,3492	1	0,0079	0,6800
272	Kota Malang	2010	0,0625	0,2016	0,6334	0,1173	4,3464	0	-0,0007	0,7556
273	Kota Probolinggo	2010	0,0612	0,2112	0,6441	0,0915	4,3085	0	-0,0020	0,5000
274	Kota Surabaya	2010	0,0709	0,2846	0,4749	0,2498	4,3474	0	-0,0030	0,8200
275	Kota Tangerang	2010	0,0668	0,2246	0,6148	0,1652	4,3198	1	0,0884	0,6600

